

**PROSPEK HUBUNGAN PERDAGANGAN BILATERAL
INDONESIA – MALAYSIA DALAM KERANGKA
KERJASAMA AFTA**



20-8-07
Fisipol
1 kelas
Hasriah
290
SKR HT

SKRIPSI

SKR-507
HAS-P

Diajukan untuk mengikuti ujian skripsi guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi hubungan internasional jurusan ilmu politik dan pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik

OLEH:

HASANUDDIN
(E 13103706-1)

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN .
MAKASSAR
2007**

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : HASANUDDIN
NOMORPOKOK : E 131 03 706-1
PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN
**JUDUL SKRIPSI : PROSPEK HUBUNGAN PERDAGANGAN BILATERAL
INDONESIA-MALAYSIA DALAM KERANGKA
KERJASAMA AFTA**

Makassar, Mei 2007

Menyetujui,

Konsultan I

konsultan II


Prof. DR. H Mappa Nasrun, MA
Nip : 130 327 024


Drs. Aspiannor Masrie
Nip : 132 992 457

Mengesahkan,
**Ketua Jurusan
Ilmu Politik dan Pemerintahan**


Dr. Armin Arsvad, M. Si
Nip: 131 961 985

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL SKRIPSI : PROSPEK HUBUNGAN PERDAGANGAN BILATERAL
INDONESIA-MALAYSIA DALAM KERANGKA
KERJASAMA AFTA

NAMA : HASANUDDIN

NOMOR POKOK : E 131 03 706-1

JURUSAN : ILMU POLITIK DAN ILMU PEMERINTAHAN

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin Makassar, untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hubungan Internasional pada hari kamis
Tanggal 5 juli 2007.

TIM EVALUASI

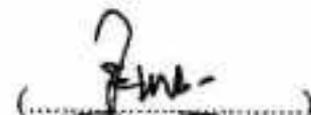
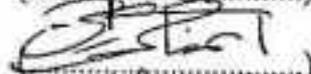
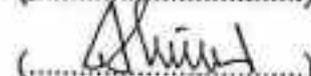
KETUA : Prof. DR. A. R. Paembonan, MS

SEKERTARIS : Agussalim, S. IP, MIRAP

ANGGOTA : Drs. Aspiannor Masrie

: Drs H.A Ya'kub Msi

: Drs Munjin Syafiq Ash'ary

()
()
()
()
()

ABSTRAKSI

HASANUDDIN, E 131 03 706-1, skripsi dengan judul *Prospek Hubungan Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka Kerjasama AFTA*. Di bawah bimbingan **Mappa Nasrun** selaku konsultan I dan **Aspiannor Masrie** selaku konsultan II.

Penulisan dimaksudkan untuk menggambarkan secara umum mengenai hubungan bilateral antara Indonesia – Malaysia khususnya kerjasama perdagangan dalam kerangka Afta yang meliputi bidang-bidang ekspor – impor dan investasi.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah berdasarkan pada studi pustaka yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, majalah, surat kabar, yang kemudian di investasikan dalam suatu tulisan seperti yang tersaji dalam tulisan ini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa antara Indonesia – Malaysia telah terjalin hubungan bilateral sejak lama baik dalam politik maupun sosial serta militer. Kedua negara tersebut memiliki berbagai macam konflik dan persoalan yang dapat menghambat kerjasama perdagangan kedua negara namun dengan adanya komitmen bagi keduanya serta terbuktinya surplus perdagangan bagi kedua negara telah memberikan peluang kerjasama dalam kerangka AFTA semakin ditingkatkan untuk tahun-tahun kedepan. Hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat terutama dari segi perdagangan yang melakukan komplementaris untuk meningkatkan pendapatan negara masing-masing dimana diketahui bahwa sejauh ini pembangunan nasional Indonesia lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh.

KATA PENGANTAR

“Bismillahirrahmanirrahim”

Tiada kata yang pantas mengungkapkan rasa syukur penulis, kecuali ucapan puji syukur kepada Allah **سبحناه و تعالی**, yang telah memberikan rahmat dan inayahNya, sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi ini, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin Makassar. Namun demikian, Penulis secara sadar merasa bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam pembuatan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan dari para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini, penulis ingin persembahkan kepada orang tua yaitu papa tercinta **H.I.M ARMAN SOELEIMAN** dan mama tercinta **Hj. TUTI SURYA DARMI** berkat jasa, doa dan kasih sayang mereka jua-lah, penulis dapat menuntaskan skripsi ini. Rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dengan segala kerendahan hati, penulis juga haturkan rasa terima kasih pada :

1. Bapak Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Radi A Gany**, yang telah memberikan perhatian besar terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dekan FISIP UNHAS, **Dr. Dedi Tikson**, beserta staff dan karyawan

3. Bapak Kepala Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS, **Dr. Armin Arsyad M. Si** dan Sekretaris Jurusan **Drs. Patrice Lamumba MA**.
4. Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional dan juga sebagai penasehat akademik, **Drs. Aspiannor Masrie**.
5. Konsultan I **Prof. Mappa Nasrun** dan Konsultan II **Drs. Aspiannor Masrie**. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan dan kesediaan waktunya untuk mengoreksi, memotivasi dan menuntun penulis dalam menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar pada jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, khususnya dosen – dosen di program studi Hubungan Internasional, yang telah membagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama dibangku kuliah. Juga, seluruh staff Akademik Jurusan Politik dan Pemerintahan, khususnya Pak Syafei dan ibu kartia yang telah memproses berkas ujian hingga pelaksanaan ujian.
7. Angkatan 03 Saudara seperjuangan dan sahabat-sahabatku **Allank, Dian, Ahmad, dan Uli Nirina** Semoga persaudaraan kita tetap kokoh hingga kapanpun, karena "*Kalianlah yang Terbaik*".
8. Saudara-saudaraku **Pasukan Bawah Tanah.... Rusdi Prawira S. Kom, S. IP** (maunya lengkap titelnya deh.), **Coba** (*bayar hutangmu 200 Rb*), **Awal Bolong** (*buronannya Pak Aspi*), **Abbas, Anto Cabul**, kalianlah inspirasi kebebasan serta petuah – petuah bijak, *kebenaran ada pada kalian*" tapi gerakan kalian telah menyusahkanku...
9. Temen-temen kuliahku, **Ronald Matre, Umma Baby** (*kau tetap Babyku*), **Asmiaty Malik S. Kom S. IP, Dinda**(*sudah – sudahmi aksimu di taum semua*

orang), Iccang Pelit , Ismi, Rio, Hari, Awal Cokro, Via Lanji, dan Iwo(awas dompetmu ketinggalan lagi...) pokoknya 03 deh.

10. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh kerabat dan orang yang telah membantu saya, saya tidak akan berarti tanpa bantuan dan dorongan kalian, mudah-mudahan di masa depan saya ada manfaatnya bagi kalian semua.

11. Terakhir, *buat semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu thanks banget deh*

Akhirnya, semoga skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amien.

Wassalam

Makassar, JUNI 2007

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABLE.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Kepentingan Nasional dan Tujuan Nasional.....	13
B. Ekonomi Politik Internasional.....	21
C. Konsep Kerjasama Bilateral dalam Peningkatan Ekonomi.....	27
D. Konsep Perdagangan Luar Negeri.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM: HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA- MALAYSIA	
A. Latar Belakang Terbentuknya AFTA.....	36
B. Perkembangan Perdagangan Bilateral Indonesia- Malaysia.....	42

C. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Malaysia.....	45
--------------------------------------------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Komplementaritas Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka AFTA.....	59
B. Faktor Penghambat Hubungan Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka AFTA.....	63
C. Peluang dan Tantangan Hubungan Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka AFTA.....	72

Bab V PENUTUP

A. Simpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	-----------

DAFTAR TABLE

		HALAMAN
TABLE 1	STRUKTUR TARIF CEPT – AFTA TAHUN 2005	40
TABLE 2	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-MALAYSIA 2002-2006	44
TABLE 3	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-BRUNAI DARUSSALAM 2001-2006	52
TABLE 4	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-THAILAND 2001-2006	53
TABLE 5	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-MYANMAR 2001-2006	54
TABLE 6	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-SINGAPURA 2001-2006	55
TABLE 7	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-MALAYSIA 2001-2006	56
TABLE 8	NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TOTAL	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini tiap-tiap negara di dunia ini tidak dapat mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional dengan Negara lain baik itu bersifat bilateral maupun multilateral. Hubungan internasional terjadi karena adanya interaksi antar negara dimana masing-masing negara mengandalkan kekuatan nasionalnya serta berusaha untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, hubungan kerjasama itu terjalin dengan memperhatikan unsur-unsur pokok yang ada dalam negeri tersebut seperti dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, serta sosial budayanya agar dapat menunjang negara tersebut lebih maju dari negara lain. Perubahan situasi internasional setelah berakhirnya perang dingin telah merubah pergeseran isu sentral dari ideologi pertahanan dan keamanan beralih ke ekonomi dan perdagangan, dimana negara negara didunia saling berpacu dan berkompetisi dalam memajukan perekonomiannya, dimana peningkatan daya saing merupakan keharusan bagi setiap negara, agar tetap mampu berbicara pada era perdagangan bebas.

Dewasa ini berbagai kebijakan telah di tempuh oleh setiap negara untuk melakukan pembaharuan di bidang politik, ekonomi serta dibidang-bidang lainnya agar dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Salah satu hal dimana sikap politik negara-negara dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh dalam interaksinya dengan

negara lain cenderung diwarnai oleh nilai-nilai yang bermuara pada kepentingan ekonomi. Situasi semacam ini telah menyadarkan banyak pihak bahwa upaya memperlancar kerjasama ekonomi adalah suatu strategi yang tepat dan bijaksana dan bahkan telah menjadi kecenderungan utama dalam kerjasama antar negara.

Adanya kemajuan serta perkembangan teknologi terutama dalam bidang komunikasi semakin memacu pencapaian globalisasi perdagangan. Kegiatan perekonomian ditandai dengan pergerakan cepat atas pasar uang, pergerakan modal, meningkatnya kompetisi antar perusahaan dalam perebutan modal, tenaga kerja yang terampil, bahan baku dan pasar. globalisasi perdagangan yang ditandai meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara sekawasan yang telah menumbuhkan keyakinan efektifitas dari modalisasi kerjasama tersebut.

Kerjasama ekonomi pada saat sekarang ini boleh dikatakan lebih menonjol kemajuannya dibandingkan bidang lainnya. Dimana frekwensi hubungan ekonomi antar negara semakin meningkat baik negara yang memiliki perekonomian yang sudah maju perekonomiannya maupun tertinggal jauh mengadakan hubungan dengan cara melakukan pertukaran barang dan jasa antara satu dengan negara lain.

Indonesia merupakan negara yang lambat menggapai kemerdekaannya mengalami kelangkaan sumber-sumber biaya pembangunan yang berasal dalam negeri, namun memiliki keunggulan dalam ketersediaan sumber daya alam. Keadaan ini memberikan suatu pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhannya melalui strategi pembangunan ekonomi dengan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan secara bilateral dengan negara-negara disekitarnya. Posisi geografis,

persamaan kepentingan merupakan alternatif pilihan dalam mencari mitra kerjasama yang saling menguntungkan. Strategi ini merupakan hal yang baik dalam menjalankan kerjasama bilateral seperti terjalinnya Hubungan perdagangan bilateral Indonesia dengan Malaysia.

Secara potensial Indonesia dapat meningkatkan kerjasama dengan Malaysia dalam bentuk kerjasama ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan. Indonesia memilih Malaysia sebagai salah satu mitra dalam perdagangan karena letak geografis kedua negara saling berdekatan dan berbatasan langsung sehingga barang ekspor-impor dapat lebih murah. Selain itu Malaysia memiliki penduduk terbanyak kedua dikawasan Asia Tenggara setelah Indonesia yang memiliki daya beli yang tinggi akan komoditi Indonesia sehingga Malaysia merupakan tempat untuk memasarkan barang-barang Indonesia. Sebaliknya Malaysia menjalin kerjasama dengan Indonesia sebagai mitra dagang, karena Malaysia menilai Indonesia memiliki barang-barang yang lebih murah dan transportasi tidak terlalu tinggi. Berbagai macam hal yang dapat di kerjasamakan oleh Indonesia dan Malaysia misalnya timah, karet dan kelapa sawit sehingga bukan tidak mungkin produk yang dihasilkan menguasai pasar dunia dan kedua negara dapat berbagi manfaat

Peningkatan perdagangan Indonesia dan Malaysia juga dipertegas oleh pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir Muhammad dalam kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 9 Maret 2000:

Kepentingan Indonesia sebagai rekan dagang kepada Malaysia yang semakin meningkat sejak beberapa tahun lalu, tidak akan menurun dalam jangka menengah maupun jangka panjang¹

Indonesia di kawasan ASEAN dalam perdagangan dengan Malaysia merupakan rekan dagang yang besar karena Malaysia memiliki properti, elektronik serta pasar modal yang lebih tinggi di banding Indonesia. Serta sebaliknya efisiensi dan rendahnya tarif jasa angkutan dan jasa telekomunikasi di miliki Indonesia dibandingkan Malaysia. ASEAN dalam menghadapi era liberalisasi perdagangan pada KTT ke 4 tanggal 27-28 Januari 1992 yang diadakan di Singapura menetapkan bahwa ASEAN akan di tingkatkan menjadi AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) mulai Januari 1993. Ide menetapkan AFTA ini, muncul mulai dari inisiatif Perdana Menteri Thailand Anand Panyarachum.²

Tujuan utama dari penerapan AFTA adalah menarik lebih banyak *Foreign Direct Investmen* serta untuk meningkatkan volume perdagangan antara sesama negara anggota. Peningkatan volume perdagangan tersebut sangat penting artinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara anggota. Perluasan kegiatan perdagangan berarti terdapat kemungkinan untuk memperluas pasar bagi para pengusaha. Dengan demikian penerapan AFTA akan mendorong perekonomian negara-negara anggota lebih efisien dan sehat baik dari segi produksi maupun segi perdagangan atau dalam kata lain menjadikan kawasan ASEAN sebagai

¹ Harian Kompas, 10 Maret 2000

² Sathiphan Chirathivat, *AFTA IN The Changing International Economy*, diambil artikel ASEAN Economy Integration with The World Through AFTA (Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies 1996). hal.21

tempat produksi kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat dipasar global.

Dalam pertemuan Chiang May September 1994 para menteri ASEAN sepakat untuk jadwal AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) dari tahun 2008 menjadi tahun 2003 dengan alasan untuk mengantisipasi atau menandingi blok kerjasama ekonomi lainnya yang sedang berbenah diri misalnya Uni Eropa dan Amerika yang sedang menjajaki Pasar Bersama Trans Atlantik, kemudian Uni Eropa sendiri yang tengah memperluas keanggotaannya hingga Eropa Timur dan China serta India yang terus berupaya melakukan liberalisasi untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perdagangan.

Namun, pada tahun 1997 hampir seluruh ASEAN menjadi kolaps karena dilanda krisis moneter yang berakibat terjadinya krisis ekonomi. Hal inilah akan mempengaruhi pada kesiapan tersebut, yang sebelumnya tidak diprediksi oleh negara-negara ASEAN. Ketika KTT-ASEAN tahun 1998 di Hanoi sepakat mempercepat implementasi penuh AFTA menjadi 1 Januari 2002 dengan fleksibilitas namun krisis ekonomi masih berlanjut dan berkepanjangan pada sebagian negara ASEAN misalnya Indonesia yang masih dapat dikatakan dalam proses perbaikan krisis ekonomi yang dimana membutuhkan bantuan asing dalam penyelesaiannya serta peningkatan perdagangan dengan negara-negara sekitarnya. Dari uraian pokok diatas maka memberi dorongan bagi penulis untuk mengkaji skripsi yang berjudul:

PROSPEK HUBUNGAN PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DALAM KERANGKA KERJASAMA AFTA

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Mengingat penelitian diatas menyangkut berbagai permasalahan maka untuk menghindari adanya perumusan yang terlalu luas cakupannya maka peneliti menganggap perlu adanya suatu penegasan atas beberapa hal yang nantinya akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Untuk itu agar dapat mengarahkan penelitian ini supaya tidak terlalu luas maka penulis membatasi pembahasan hanya dalam bidang Latar belakang terbentuknya AFTA, kebijakan perdagangan luar negeri dan hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia dalam kerangka AFTA itu sendiri. Dikarenakan keterbatasan waktu serta kemampuan yang dimiliki oleh penulis.

Perdagangan Indonesia – Malaysia pada periode 2002-2006 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 13,10% per tahun. Peningkatan ini dapat dilihat pada tahun 2002 total perdagangan Indonesia - Malaysia mencapai US\$ 3.067.347,1

Hubungan kerjasama Indonesia-Malaysia sangat luas dalam kerangka AFTA serta berbagai kendala maka prospek kerjasama perdagangan Indonesia-Malaysia hingga tahun 2008. Berdasarkan dari latar belakang masalah dan batasan masalah maka penulis mencoba membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor komplementaris yang mempengaruhi peningkatan perdagangan Indonesia–Malaysia dalam kerangka AFTA.
2. Apa faktor penghambat kerjasama perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam kerangka AFTA.
3. Apa peluang dan tantangan hubungan perdagangan Bilateral Indonesia – Malaysia dalam kerangka AFTA.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Faktor komplementaris mempengaruhi peningkatan perdagangan Indonesia-Malaysia. Dalam kerangka AFTA
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kerjasama perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam kerangka AFTA
- c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk tantangan kerjasama perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai bahan masukan untuk diskusi lebih lanjut dan pemberian informasi kepada para mahasiswa hubungan Internasional khususnya yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia khususnya terhadap peningkatan hubungan kerjasama dalam kerangka AFTA.
- b. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi pengkaji masalah masalah hubungan internasional

D. Kerangka Konseptual

Setelah dapat menganalisis latar belakang masalah yang kemudian tertuang dalam tulisan diatas maka diperlukan kerangka konseptual untuk memback-up tulisan ini baik berupa konsep tentang kepentingan nasional maupun konsep tentang ekonomi politik intemasional dan konsep kerjasama Bilateral serta AFTA seagai suatu kerjasama Biateral secara teoritis dari berbagai literatur maupun statement yang membahas tentang pokok dari masing-masing prinsip ekonomi dan kerjasama perdagangan khususnya yang menyangkut prospek kerjasama perdagangan Indonesia-malaysia dalam kerangka AFTA. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan tulisan/kajian yang bersifat sistematis dan ilmiah yang di dasari oleh teori-teori dalam hubungan internasional.

Secara teoritis untuk mempertahankan kelangsungan suatu negara dibutuhkan kerjasama antar negara dengan negara lainnya yang saling menguntungkan dan saling berkepentingan satu sama lainnya. Ketergantungan dibidang ekonomi merupakan reaksi atas kondisi dasar kehidupan internasional dimana tidak satupun negara secara ekonomi dapat berdiri dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Hubungan kerjasama Bilateral Indonesia dengan Malaysia tidak terlepas dari kepentingan nasional tiap-tiap negara. Menurut Kresner, kepentingan nasional adalah

:

Semua tujuan yang ditentukan dan dirumuskan oleh negara merupakan kepentingan nasional. Dalam hal ini negara bertindak sebagai aktor otonom karena apa yang dimaksud dengan negara disini adalah para pembuatan kebijakan³.

Sedangkan Plano dan Olton memaparkan bahwa kepentingan nasional itu adalah :

Kepentingan nasional merupakan konsesi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, unsur tersebut mencakup kepentingan bangsa dan negara, kemerdekaan, kebutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kerjasama ekonomi.⁴

Pada dasarnya hubungan suatu negara dengan negara lain dalam suatu kawasan adalah hal yang sangat penting. Dimana salah satu bentuk hubungannya dalam bidang ekonomi. Hubungan tersebut dapat dilakukan antar negara, antar individu antar organisasi dan lain sebagainya yang kesemuanya itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing mengenai tujuan ekonomi internasional. Makmur menyatakan bahwa

Tujuan dari ekonomi internasional adalah mencapai kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia. Pelaksana ekonomi internasional merupakan kerjasama bantu membantu antar bangsa atau negara negara. Dengan adanya kerjasama ini maka kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh persediaan dalam negerinya dapat terpenuhi oleh negara lainnya⁵

Dalam kerjasama ekonomi internasional terdapat berbagai bentuk kerjasama diantaranya adalah kerjasama perdagangan luar negeri. Adapun pengertianya

³ Stephen D. Kresner, *Defending the National Interest*, Princeton University Press, New Jersey, 1978, hal 10.

⁴ Jack C. Plano dan Roy Olton, *kamus hubungan internasional*, Abardin, Bandung, 1990, hal 5

⁵ Teuku May Rudy, *Teori Etika dan Kebijakan internasional*, Angkasa, Bandung, 1993, hal 117

menurut David T Mason adalah pada umumnya mengacu pada pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara⁶

Dalam konsep kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dapat dikatakan suatu kebutuhan karena keterbatasan kemampuan memenuhi segala kebutuhan masing-masing negara akibat dari pada faktor kebutuhan dan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri maka terciptalah antara hubungan kerjasama antar negara yang saling menguntungkan.

E. Metode Penelitian.

Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang maksimal mengenai judul tersebut diatas maka penulis memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Serta menggambarkan bagaimana interksi prospek hubungan kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dengan Malaysia dalam kerangka AFTA. Penulis menganalisis faktor penghambat dalam hubungan kerjasama perdagangan kedua negara tersebut.

2. Tehnik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari sejumlah literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dalam objek penelitian sehingga sebagian besar data

⁶David T. Mason, *Foregren Trades and the national Economi*, Press Publiser. New york, 1975, hal 197

dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, laporan, maupun surat kabar. Adapun tempat-tempat yang akan dikunjungi penulis untuk dapat memperoleh data tersebut adalah:

1. Departemen Luar Negeri RI di Jakarta
 2. Kedutaan Malaysia di Jakarta
 3. *Center for Strategic and International Study*(CSIS) di Jakarta
 4. Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin di Makassar
 5. Perpustakaan FISIP Universitas Hasanuddin
 6. Kantor Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Departemen Perdagangan di Jakarta
 7. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia di Jakarta
 8. Biro Statistik di Jakarta
 9. *Centre for Information and Development Study* (CIDES) di Jakarta
 10. Perpustakaan Wilayah di Makassar
 11. Kantor Balitbang Departemen Luar Negeri RI di Jakarta
 12. Sekretariat ASEAN di Jakarta
3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dihimpun dari hasil telaah pustaka dari berbagai buku jurnal dokumen-dokumen, majalah dan surat kabar serta literatur-literatur yang memuat data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Tehnik Analisa Data

Tehnik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif yaitu dilakukan terhadap fenomena-fenomena yang tidak dapat di kuantifikasikan dengan tujuan menggambarkan variabel-variabel yang dapat di bandingkan secara rinci atas dasar hasil studi pustaka yang sebagaian besar adalah data yang bersifat kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kepentingan Nasional dan Tujuan Nasional

Salah satu konsep yang paling populer didalam mendeskripsikan, menjelaskan atau meramalkan perilaku politik luar negeri suatu negara adalah konsep kepentingan nasional (*national interest*), misalnya kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia dalam meningkatkan perekonomian kedua negara serta menjalin hubungan bilateral kedua negara yang merupakan negara yang berada satu kawasan dan satu geografis ini.

Dari analisis, menurut Mas'ood sangat populer dalam studi hubungan internasional. Hampir semua ilmuwan maupun praktisi hubungan internasional sepakat bahwa alasan pembenaran bagi tindakan suatu negara adalah kepentingan nasional. Namun, ketika sampai pada konseptualisasi dan defenisi yang disepakati dan diterima luas, spesifikasi kepentingan nasional suatu negara, tentang siapa yang menentukan prioritas tindakan yang akan dilakukan oleh suatu negara, serta kapan dan bagaimana urutan prioritas itu harus ditetapkan.⁷

Sejalan dengan itu, Viotti dan Kauppi berpendapat bahwa banyak kalangan *Pluralis* menggugat para kaum *Realis* ketika menempatkan negara dalam posisi yang berdaulat dan selalu berperilaku rasional dengan menempatkan kepentingan nasional

⁷ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 39

sebagai tameng pembenaran tindakannya (khususnya tindakan luar negeri).⁸ Dalam hal ini, kedua pemikir tersebut mempertanyakan bahwa dapatkah dikatakan aktor nasional berpikir dan berperilaku rasional ketika ternyata suatu keputusan (tentang tindakan politik luar negeri) adalah merupakan hasil dari proses tawar-menawar, kompromi, tergesa-gesa, atau taktik yang sejenis yang hanya dilakukan oleh beberapa organisasi pemerintah atau sekelompok kecil individu elit.

Salah satu pemikir yang mengkaji politik luar negeri termasuk perdebatan mengenai konsep kepentingan nasional ini adalah Holsti. Menurut Holsti, kepentingan nasional atau apa yang disebutnya sebagai kepentingan dan nilai inti, digambarkannya sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini, menurutnya lagi, biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa *reserve* atau sikap kritis.

Holsti dalam hal ini menghubungkan kepentingan nasional dengan pemeliharaan dari suatu unit politik. Kepentingan dan nilai inti itu merupakan tujuan jangka pendek, karena tujuan lain jelas tidak mungkin dicapai apabila unit politik yang mengejanya tidak mempertahankan eksistensinya sendiri.⁹ Dalam pengamatan Holsti seperti yang diutarakan di atas, ia melihat bahwa kepentingan nasional itu akan

⁸ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory (second edition)*, Macmillan Publishing Company, New York, 1993, hal. 539

⁹ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk analisis*, terj. M. Thahir Azhari, Erlangga, Jakarta, 1998, Edisi IV Jilid II, hal. 171

tergantung pada persepsi dari suatu bangsa akan kebutuhannya yang paling mendesak dengan memperhitungkan aspek internal (domestik) dan aspek eksternalnya pada waktu pemerintahan tertentu. Hal ini telah diidentikkan bahwa

kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama antara semua negara bangsa, seperti keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan.¹⁰

Sementara itu **Plano dan Olton** sendiri melihat bahwa kepentingan nasional yang relatif identik antara semua negara itu mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara (*self-preservation*), kemerdekaan (*independence*), keutuhan wilayah (*territorial integrity*), keamanan militer (*military security*), dan kesejahteraan ekonomi (*economic well-being*).¹¹ Namun dalam beberapa hal antara kepentingan nasional dan tujuan nasional sebenarnya berbeda. Tujuan nasional (*National objectives, National Goals*) pada umumnya berjangka panjang, lebih mendasar dan lebih luas cakupannya, cenderung filosofis dan bersifat makro. Contohnya "tujuan nasional" untuk mensejahterakan bangsa bersifat jangka panjang. Sedangkan "kepentingan nasional", merupakan derivasi atau turunan dari "tujuan nasional", secara lebih spesifik, terbatas cakupannya atau terbatas kepada program tertentu, cenderung praktis (tidak filosofis), dan mudah berubah guna disesuaikan dengan tuntutan jaman atau persepsi mayoritas rakyat. Mencermati hal diatas, dapat dipahami bahwa kepentingan nasional sendiri bisa berjangka panjang dan bisa berjangka pendek.

¹⁰ Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relation's Dictionary*, Alih bahasa Wawan Juanda, CV Putra A. Abardin, Bandung, 1990, hal. 142

¹¹ T. May Rudy, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal. 27

Konsep kepentingan nasional lazim diidentikkan dengan konsep tujuan nasional suatu negara. Bila kita kaji perbedaan antara kepentingan nasional dan tujuan nasional, dapat kita temukan perbedaan yang mendasar yaitu : tujuan nasional (*National Objectives, National Goals*) pada umumnya berjangka panjang, lebih mendasar, lebih luas cakupannya, cenderung filosofis dan bersifat makro, sedangkan kepentingan nasional (*National Interest*), merupakan turunan atau derivasi dari tujuan nasional. Secara lebih spesifik, kepentingan nasional mempunyai cakupan yang lebih sempit, cenderung praktis, dan mudah berubah dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jaman dan eskalasi hubungan dengan negara lain.

Kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini, yaitu keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*prosperity*), pasti terdapat serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara.

Kepentingan nasional dan tujuan nasional sering dijadikan tolak ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap dan tindakan. Tentunya termasuk menjadi patokan dalam merumuskan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta

melindungi, apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai "kepentingan nasional" itu.

Kepentingan nasional sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang berorientasi kepada ideologi atau berorientasi kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya bahwa setiap keputusan dan tindakan politik luar negeri bila didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ideologi atau atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan. Bisa juga kadang-kadang terjadi *interplay* antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin suatu hubungan timbal balik dan terjadi saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak menutup kemungkinan terjadi formulasi yang lain atau baru.¹²

Dalam keputusan dan tindakan politik luar negeri kadang-kadang terjadi *disparatis* (perbedaan) antara statement-statement tentang nilai dan prinsip yang di anut disatu pihak dengan politik praktis di pihak lain.¹³ Kita melihat bahwa terdapat hubungan antara kepentingan nasional dengan sasaran sebagai penjabaran dari kepentingan nasional. Disparatis muncul karena dalam merancang sasaran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kepentingan praktis.

Columbus dan Wolfe mencoba menyusun kriteria yang dapat dipakai untuk mendefinisikan kepentingan nasional yang diharapkan akan memudahkan dalam

¹² Drs. R. Soeprapto, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Rajawali Pers, Jakarta 1997, hal. 150

¹³ Theodore A. Columbus dan James H. Wolfe, *International Relations: Power and Justice*, alih bahasa M. Marbun, CV Putra A. Abaridin, Bandung, 1990, hal. 107

penyusunannya serta pengimplementasiannya ke dalam kebijakan politik luar negerinya.¹⁴ Terdapat 10 kriteria yakni sebagai berikut:

1. *Kriteria Filosofi Operasional*
2. *Kriteria Ideologi*
3. *Kriteria Hukum dan Moral*
4. *Kriteria pragmatis*
5. *Kriteria Kemajuan Profesi*
6. *Kriteria Partisan/Pengikut*
7. *Kriteria Kepentingan Birokrasi*
8. *Kriteria Etnik/Rasial*
9. *Kriteria Kelas dan Status*
10. *Kriteria Ketergantungan Luar Negeri*

Merujuk kepada pendapat Frankel yang mengatakan bahwa :

Kepentingan nasional pada hakikatnya merupakan keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh bangsa terhadap nilai tersebut, Boddiono berpendapat bahwa apabila dirumuskan akan mencerminkan pandangan hidup dari suatu bangsa, dan pandangan hidup tadi baru menjadi relevan bagi politik luar negeri setelah dijabarkan sebagai sasaran yang pragmatis menurut Holsti dapat digariskan menurut bermacam-macam kategori.¹⁵

Sedangkan Morgenthau, seorang pelopor pandangan realis dalam studi Hubungan Internasional mencoba menyamakan kepentingan nasional dengan *power* yang ingin dicapai suatu negara. Dengan kata lain, menurutnya hakekat kepentingan nasional merupakan *power* (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).¹⁶ Konsep kepentingan nasional menurut Paul Seabury secara *normatif* dan *deskriptif*. Secara normatif, konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu

¹⁴ Drs. R. Soeprapto, Loc.cit, hal. 165

¹⁵ Dr. Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan internasional, Kerangka Studi Analists*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, hlm: 35

¹⁶ Umar Suryadi Bakri, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jayabaya University Press, Jakarta, 1999, hal. 61

bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dikatakan kumpulan cita-cita karena di dalamnya tidak hanya bercita-cita untuk mengejar power semata, tetapi juga cita-cita yang lain. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Disisi lain Warsito melihat bahwa

Kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional ataupun kekuatan nasional, sehingga negara bangsa yang bersangkutan merasa perlu mencari pemenuhan kepentingan nasionalnya keluar dari batas-batas negaranya.¹⁷

Hakekat kepentingan nasional menurut Frankel sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Lanjutnya, kepentingan nasional dapat melukiskan aspirasi negara dan kepentingan nasional dapat pula digunakan secara operasional yang dapat dilihat dalam aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana yang dituju. Dengan demikian, baik kebijaksanaan maupun rencana yang dituju berorientasi kepada kepentingan nasional.

Kepentingan nasional dapat dirumuskan secara luas, sehingga perlu memasukkan pertimbangan-pertimbangan moral, agama, kesejahteraan, dan hal-hal yang bersifat *altruistis* lainnya. Dalam praktek aktualnya, kepentingan nasional tidak hanya dibuat oleh seorang negarawan yang menganut teori Hegel yang menyatakan bahwa negara adalah kebaikan tertinggi (yang menjadi dasar totalisme) tetapi juga

¹⁷ Tulus Warsito, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1998, hal.29

bisa dibuat oleh negarawan lain yang percaya bahwa negara semata mata hanya merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya.

Kepentingan nasional diakui sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri sepanjang mengenai kepentingan nasional, orang bisa berorientasi kepada ideologi atau berorientasi kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa berdasarkan atas pertimbangan kepentingan. Kadang-kadang, terjadi *interplay* antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin suatu hubungan timbal balik sehingga mempengaruhi pertimbangan ideologis dan pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terjadi formulasi yang lama ataupun yang baru.

Bertemunya kepentingan dari berbagai negara bangsa merupakan sumber terjadinya hubungan kolerasi. Sedangkan koalisi akan terbentuk dan akan bertahan lama apabila berbagai bangsa yang terlibat memiliki kemauan yang kuat dan memutuskan bersedia untuk bertindak berdasarkan kepentingan bersama mereka. Perselisihan internasional merupakan konsekuensi dari kepentingan nasional yang bertentangan, dengan menggunakan dasar perhitungan kepentingan yang kuat, yang diperoleh baik dari perselisihan maupun kolaborasi, sering dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mencapai kondisi keseimbangan yang diharapkan. Setiap keputusan mengenai kepentingan nasional harus selalu berdasarkan kepada keuntungan nasional yang kongkret dan bisa ditunjukkan dalam batas kebijaksanaan bukan berdasarkan moralistik-legalistik. Seorang pemimpin nasional jika perlu, bisa

saja berbohong, menipu, ataupun berhubungan dengan tipu daya untuk menjamin kelangsungan hidup negaranya.

B. Ekonomi Politik Internasional

Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara dua negara merupakan fenomena ekonomi-politik internasional. Dalam hubungan tersebut terdapat indikator-indikator dan landasan yang bagi dua buah negara untuk saling bekerja sama. Dalam takaran akademik keputusan sebuah negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain sesungguhnya didasari oleh paradigma atau *mainstream* pemikiran yang sedang berlaku di negara tersebut atau di dunia internasional.

Kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia tak terlepas dari paradigma tersebut. Keputusan kedua negara untuk melakukan kerjasama dua negara bukan saja didasari oleh kepentingan masing-masing negara tapi juga sesungguhnya kedua negara sedang menjalankan paradigma yang berlaku di dalam ekonomi-politik internasional. Dalam membahas permasalahan mengenai ekonomi politik internasional, khususnya dalam kerjasama perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia. Hal yang menjadi bahan analisa utama adalah mengenai pengertian ekonomi politik internasional itu sendiri. Di mana pengertian ekonomi politik internasional sangat penting dalam membahas peningkatan perdagangan Indonesia-Malaysia.

Pengertian istilah ekonomi internasional tidak akan ditemukan dalam literatur-literatur yang ada, tetapi jika membaca literatur tersebut maka kita akan mendapatkan

pengertian dan ruang lingkup yang berbeda. Antara ahli yang satu dengan ahli yang lainnya akan memahami istilah tersebut secara berbeda-beda, bahkan seringkali perbedaan itu dirasakan sangat tajam. Berbagai pendekatan dan perspektif telah dikembangkan untuk membentuk serangkaian teori yang mencoba menjelaskan hubungan timbale balik antara ekonomi dan politik.

Beberapa ahli ekonomi mengemukakan bahwa faktor-faktor ekonomi yang menjadi determinan (*faktor penentu utama*) atas berbagai fenomena politik penting yang muncul di berbagai masyarakat atau negara (*economic theory of politics*)¹⁸ disini ekonomi merupakan alat sumber atau penyebab, sedangkan politik merupakan tujuan, hasil atau akibat, dipihak lain ada pula beberapa ahli politik yang mengemukakan bahwa faktor-faktor politik merupakan determinan atas berbagai fenomena ekonomi yang terjadi (*political theory of economic growth*),¹⁹ dalam teori ini menjadi alat sebab atau sumber adalah faktor-faktor politik sedangkan ekonomi menjadi tujuan hasil dan akibatnya.

Pengertian lebih lanjut mengenai ekonomi politik yang telah di kemukakan oleh **Juwono Sudarsono** bahwa :

Ekonomi politik adalah sintesa yang memadukan ilmu ekonomi dan ilmu politik ke dalam suatu kerangka analisis yang lebih menyeluruh (komprehensif) ini merupakan usaha untuk memadukan antara rasional ekonomi dan kebijakan politik²⁰

¹⁸ Jan Erick Lane, *Ekonomi Politik Komparatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1994, hal 326

¹⁹ Jan Erick Lane, *ibid*

²⁰ Juwono Sudarsono, *Teori Pembangunan: Suatu Himbauan untuk Ekonomi Politik*, prisma No.1, Jakarta, 1980, hal 86

Rasionalisme ekonomi menginginkan keuntungan optimal dari pengorbanan seefisien mungkin sedangkan kegiatan politik menyaratkan terjadinya perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupan warga negara secara alamiah tanpa adanya kepentingan warga negara yang dikorbankan secara paksa.

Secara sepintas dapat dikatakan bahwa konsep itu dapat diartikan sebagai interaksi antara politik dan ekonomi. Definisi sederhana mengenai ekonomi politik internasional diatas mengakui adanya hubungan timbale balik antara politik dan ekonomi, menurut **Robert Gilpin** dalam buku karangan Walter S. Jones, bahwa:

Pada suatu pihak politik begitu menentukan aktivitas ekonomi dan menggerakannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominant penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi, dipihak lain proses ekonomi itu cenderung untuk mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan ekonomi merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi dinamika hubungan internasional dijamin modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik²¹

Secara global menurut Frieden dan lake, 1991: "*The Study of Interplay of Economics and Politics in the World Area*" disini ekonomi di definisikan sebagai sistem produksi distribusi dan konsumsi kekayaan, sedangkan politik sebagai seimbang lembaga atau aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi²²

²¹ walter S. Jones, *logika hubungan internasional*, PT gramedia pustaka, jakarta, 1993, hal 223-224.

²² Moctar Mas' oed, *ekonomi politik dan pembangunan*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 1994, hal 3

Unsur-unsur kekuatan ekonomi yang dimiliki komunitas suatu negara dapat dialokasikan untuk mendukung tercapainya tujuan politik negara begitupun sebaliknya. Sedangkan, aplikasi kebijakan politik yang dilakukan pada dasarnya untuk membuka jalan tercapainya kesejahteraan ekonomi sehingga terjadinya interaksi timbal balik yang saling melengkapi antara keduanya. pada hakikatnya timbal balik antara perbedaan argumentasi di dalam memandang interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik, secara konteks yang membedakan masyarakat dan negara sebagai tempat berlangsungnya interaksi. Adanya perbedaan konteks tempat berlangsungnya interaksi menghasilkan dua pemikiran yaitu ekonomism dan politism.

Ekonomism menganggap bahwa interaksi kegiatan ekonomi dan aktivitas politik berlangsung dalam masyarakat. Adapun perilaku proses politik di tentukan oleh hasil interaksi kelompok kepentingan. Kedua jenis kelompok sosial ini menganggap bahwa kepentingan mereka itu dsapat diharapkan dari hasil tindakan negatif maupun struktur pemerintahan. Dipihak lain politism beranggapan bahwa negara sebagai suatu tempat dari hasil kegiatan politik menentukan sistem ekonomi. Sehingga negara maupun struktur pemerintahan selain mengembangkan kepentingan sendiri juga dapat melaksanakannya ke dalam kepentingan yang spesifik.

Keterkaitan yang penting dari kepentingan ekonomi politik dalam kerangka kerjasama bilateral berangkat dari pemikiran dasar yang menjadi pemikiran dasar dari ekonomi dan politik. Rasionalisme ekonomi menginginkan keuntungan optimal dari

pengorbanan yang seefisien mungkin sedangkan suksesi kebijakan politik memasyarakatkan terjadinya perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan warga negar secara alamiah tanpa adanya kepentingan warga yang di korbakan secara paksa keterkaitan antara ekonomi dan politik berlangsung baik. Dalam, hubungan antar bangsa selain bersifat kotemporer, juga menjadi trend (kecenderungan) utama bidang interaksi antar bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Namun, terkadang banyak masalah politik dan ekonomi yang timbul dalam kerangka kerjasama bilateral. Terkadang masalah politik tidak dapat dipecahkan oleh disiplin ilmu yang sama, begitu pula dengan masalah ekonomi, sebab yang terjadi dewasa ini di mana masalah-masalah politik dan ekonomi berkait, sehingga diperlukan suatu pendekatan tertentu untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut, terutama pada pendekatan " metode analisis politik ekonomi dan ekonomi politik. Metode analisis politik ekonomi dapat dikatakan sebagai penerapan dari cara pendekatan yang barasal dari teori politik untuk memahami masalah ekonomi. Metode ini oleh pakar ilmu sosial sering disebut *political economy*, dimana teori politik di coba untuk dimanfaatkan guna memahami permasalahan politik. Para pakar politik justru mencoba menerangkan apa tindakan-tindakan ekonomi yang perlu dilakukan oleh aktor-aktor tertentu ketika mereka melakukan kegiatan politik.

Menurut para ahli fenomena ekonomi politik internasional yang berperan hanya dua variabel yaitu "ekonomi dan politik". Variabel ekonomi disini berbentuk pasar (*market*), pertukaran (*exchange*) dan kekayaan (*wealth*), sedangkan variabel politik terbentuk negara (*state*) kewenangan (*authority*), dan kekuasaan/kekuatan (*power*).²³

Pada dasarnya pusat kajian ekonomi politik dalam hubungan internasional adalah pasar dan negara yang merupakan perwujudan dari ekonomi dan politik. Keduanya saling berhubungan timbal balik dimana kita tidak bisa menyimpulkan faktor mana yang paling penting daripada lainnya. Malahan hubungan mereka akan bersifat sirkulus, dimana ada suatu gejala lain yang lebih menggambarkan faktor ekonomi dan lain pihak di dominasi oleh faktor politik. Misalnya bagaimana negara dan proses yang terkait mempengaruhi produksi dan distribusi kekuatan dan kemakmuran antar negara atau antar aktor-aktor politik lainnya, yang lebih khusus adalah bagaimana kekuatan ekonomi bisa mengubah sistem distribusi kekuatan politik dan militer internasional.

Roger Tooze (1984) mengatakan bahwa istilah ekonomi politik di gunakan untuk mengacu pada seperangkat masalah yang timbul dari interaksi antara aktivitas ekonomi dan politik dalam arena dunia. Interaksi yang timbul antara ekonomi dan politik itu adalah bagaimana suatu negara dipengaruhi oleh faktor pasar. Untuk menghadapi masalah yang timbul maka harus ada dipengaruhi antara faktor ekonomi dan faktor politik, harus ada keseimbangan antara unsur-unsur negara dan

²³ Umar Suryadi Bakry, *Ekonomi Politik Internasional*, LP3M Universitas Jayabaya, Jakarta, 1997, hal 2

faktor-faktor pasar atau antara kekayaan dan kekuatan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

C. Konsep Kerjasama Bilateral dalam Peningkatan Ekonomi

Hubungan internasional dapat terselenggara karena adanya interaksi antar negara. Dalam mewujudkan strategi global dan kepentingan negaranya, hubungan antar bangsa sangat diperlukan oleh setiap negara. Dari hubungan tersebut dapat dirumuskan kerjasama sebagai upaya dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara. kerjasama dapat diadakan dalam berbagai bentuk mulai dari kerangka kerjasama bilateral (dua negara) maupun multilateral (beberapa negara). Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam hubungan internasional memiliki makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Konsep hubungan bilateral ini digunakan untuk memperkuat kerjasama antara dua negara dengan menggunakan pengaruhnya sehingga dapat menacapai tujuan nasionalnya.

Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua negara.²⁴

Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Dalam hal ini hubungan tersebut terjalin dalam kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Malaysia

²⁴ Krisna, Didi, *Kamus Politik Internasional*, Jakarta: Grasindo, 1993 Hal 50

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara, dan tidak tergantung hanya pada negara yang dekat saja melainkan juga negara yang secara geografis letaknya agak jauh. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara.

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan internasional ini berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam konteks kerjasama diidentifikasi dengan bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu kerjasama berdasar pada:

Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama.²⁵

²⁵ K. J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis*, Erlangga, Jakarta, 1998, hal. 209

Pendapat **Holsti** diatas memberikan batasan konsepsi yang jelas antara dua bentuk interaksi dalam hubungan internasional, yaitu konflik dan kerjasama. Apabila dalam menghadapi satu kasus atau lebih pihak-pihak yang terlibat gagal mencapai kesepakatan, maka interaksi antar aktor tersebut akan berujung pada konflik. Namun apabila pihak-pihak yang terlibat berhasil mencapai suatu kesepakatan bersama, maka interaksi antar aktor tersebut akan menghasilkan suatu bentuk kerjasama. Kerjasama dalam peningkatan ekonomi perdagangan yang telah dijalin antara Indonesia dengan Malaysia juga telah melalui proses seperti yang telah dijelaskan diatas.

Negara-negara melakukan kerjasama perdagangan internasional karena di dasari oleh dua alasan utama : pertama, negara-negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Bangsa-bangsa sebagaimana individu-individu dapat memperoleh keuntungan dari perbedaan perbedaan mereka melalui suatu pengaturan dimana setiap pihak melakukan dengan relatif lebih baik. Kedua negara negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis dalam produksi. Kedua motif tersebut mencerminkan interaksi dari pola-pola perdagangan internasional.

Perbedaan-perbedaan dari setiap negara memberi peluang terjadinya perdagangan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat. Konsep dasar dari analisis ini adalah keunggulan komperatif. Hal ini dipertegas oleh pendapat **Kindleberger** bahwa:

Dalam teori perekonomian internasional hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki oleh setiap negara dalam memproduksi. Keunggulan komperatif (komperatif Advantages) tersebut membuka kesempatan pada spesialisai yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan yang sesuai dengan kepentingan nasional.²⁶

Kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang didasari atas adanya keunggulan komperatif akan mendorong rasa saling ketergantungan (*interpendensi*) antar negara-negara ASEAN dianggap penting dalam rangka tercapainya suatu pola interaksi dinamis mealaui kerjasama ekonomi yang didukung keunggulan komperatif masing masing negara ASEAN. **Karl W Deuth** mempertegas bahwa dua negara dikatakan saling ketergantungan (*interpendensi*) ketika yang terjadi di negara A diikuti pula oleh perubahan perubahan yang sudah diperkirakan di negara-negara B.²⁷ Interpendensi atau saling ketergantungan diantara negara-negara ASEAN tersebut menurut **Rais dan Yahya Munaieimin** di jelaskan bahwa :

Interpendensi adalah teori yang menyatakan bahwa kerjasama jangka panjang yang di sebabkan karena adanya saling hubungan dalam bidang sosial ekonomi, tehnologi. Oleh karena itu itulah semboyan "kemenangan adalah kekayaan saya" akan digantikan oleh "kemenangan atau kekalahan kita bersama.

Menurut **Mas'ood** pengertian interpendensi secara sederhana menunjukan pada kontak atau pertukaran di antara bangsa, situasi ini timbul karena perubahan yang terjadi pada suatu negara atau bangsa menimbulkan perubahan penting disatu atau lebih negara lainnya atau akibat dari tindakan dari satu negara bangsa, sebagian

²⁶ kindleberger, charles, *Ekonomi internasional II*, Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 13

²⁷ ibid, hal 20

ditentukan oleh apa yang dilakukan negara bangsa lain. Implikasi paling penting ini adalah bahwa interdependensi bisa timbul di antara kawan maupun lawan.²⁸

Disamping itu penggunaan istilah bilateral untuk mengasumsi hubungan yang terjadi antara dua negara bahan secara geografis berdekatan ataupun berjauhan yang dikemukakan oleh **Kusumoharjo** tentang hubungan bilateral sebagai berikut:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utang untung untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan utamanya adalah struktur ekonomi.²⁹

Adapun, tujuan atau sasaran kerjasama bilateral dapat dibedakan dalam dimensi waktu, yang terbagi atas:

1. Tujuan jangka pendek, pada umumnya meliputi persoalan yang harus di atasi segera.
2. Tujuan jangka menengah, pada umumnya mencakup volume masalah besar dan beragam.
3. Tujuan jangka panjang, mencerminkan cita-cita utama dari suatu bangsa dalam kerangka masyarakat internasional.

²⁸ Mas'oed, Mohtar, *pengantar ekonomi politik internasional*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995, hal 19

²⁹ Kusumoharjo, Budiono, *Hubungan Internasional: Kerangka Study Analisis* Cetak Bina Cipta, Jakarta, 1987, hal 3

Bentuk kerangka kerjasama bilateral di bidang ekonomi tampaknya lebih cenderung dikategorikan kedalam sasaran jangka menengah. Adapun tujuan kategori jangka menengah,³⁰ antara lain:

1. Mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi.
2. Meningkatkan prestise negara. Prestise diukur dengan tingkat perkembangan industri dan keterampilan ilmiah serta teknologi
3. Mencakup banyak bentuk perluasan diri. Negara tidak menduduki suatu wilayah tertentu tetapi mencari keuntungan termasuk akses pada bahan mentah, pasar rute perdagangan dan sebagainya.

Kerjasama ekonomi anantara negara baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral semakin penting artinya, mengingat suatu negara tidak mungkin dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa adanya kerjasama ataupun bantuan negara lain. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan setiap negara didunia ini, maka bentuk kerjasama semakin bervariasi, baik bidang maupun sifatnya dengan demikian bentuk kerjasama yang menyangkut segala kehidupan manusia seperti bidang ekonomi, politik, militer, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

Bidang ekonomi merupakan kerjasama yang banyak dilaksanakan oleh negara negara di dunia mengingat karena kerjasama ekonomi memiliki banyak

³⁰ K.J Holskti, *politik internasional; kerangka analisis jilid 2*, Edisi ke-4, Erlangga, Jakarta, 1988, hal 209

kelebihan di bandingkan dengan bentuk kerjasama di bidang lain. Selain kerjasama ini dapat segera di wujudkan dan dirasakan manfaatnya sehingga kepentingan nasional suatu negara dapat segera dipenuhi.

Kerjasama bilateral ekonomi dapat berlangsung bila kedua belah pihak dapat terpenuhi kebutuhannya, tidak ada suatu pihakpun yang merasa dirugikan hal ini berarti kerjasama ekonomi bilateral merupakan sesuatu yang baik dan harus memperhatikan faktor interpendensi dan keuntungan yang diperoleh guna kelangsungan kerjasama itu. dalam kerjasama bilateral Indonesia- Malaysia adalah suatu bentuk kerjasama antar negara yang berdekatan secara geografis dengan sasaran utama menciptakan kerjasama politik kebudayaan dan struktur wknomi. Kerjasama Indonesia dan Malaysia pada pokoknya dalam hal penentuan kebijaksanaan luar negeri pada umumnya yang menitik beratkan pada usaha-usaha untuk memecahkan persoalan yang terjadi, baik masalah luar negeri maupun dalam negeri. Misalnya kebijakan kedua negara dalam menghadapi masalah krisis moneter yang terjadi dikawasan Asia Tenggara.

Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atas dasar saling menguntungkan. Perdagangan bilateral dapat dilakukan berdasarkan perjanjian perdagangan atau dapat pula dikatakan tanpa suatu perjanjian perdagangan. Kerjasama Indonesia dan Malaysia telah terjalin jauh sebelum kedua negara tersebut merdeka. Namun kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia jauh sebelum kedua negara tersebut merdeka. Namun kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia dalam

kerjasama ekonomi secara formal dilaksanakan pada tahun 1973. kerjasama tersebut menyangkut " persetujuan kerjasama Ekonomi dan Teknik".

Kerjasama bilateral antara Indonesia-Malaysia yang dalam bidang ekonomi sosial dan budaya adalah kerjasama yang bersifat fungsional. Dalam kerangka kerjasama yang bersifat fungsional kedua negara terlibat mendukung atau melengkapi kekurangan masing-masing negara disesuaikan dengan spesifik negara yang satu, yang sebaliknya merupakan kelemahan spesifik negara yang lainnya pada jangka waktu yang bersamaan demikian pula sebaliknya.

D. Konsep Perdagangan Luar Negeri

Dengan adanya hubungan ekonomi antar bangsa merupakan kebijakan politik luar negeri yang didasarkan atas kepentingan nasional masing-masing negara. Dimana negara memiliki perbedaan dengan negara-negara lainnya, hal ini disebabkan adanya kelangkaan barang (*Scacity*). Perbedaan faktor produksi dan perbedaan harga barang, baik secara bilateral maupun multilateral, organisasi ataupun individu. Sejak dasawarsa tuju puluhan . hubungan antar negara majku denagn negara berkembang tidak lagi sekedar hubungan depedensi bagi negara berkembang, melainkan saling ketergantungan karena adanya saling membutuhkan antar kedua belah pihak dalam hal ini nampak dalam bidang ekonomi dengan adanya ketidaksamaan yang mencolok antara negara yang satu dengan negara yang lain mendorong negara tersebut untuk melakukan kerjasama ekonomi. Setiap negara yang akan memberikan kemakmuran kepada rakyatnya, maka perdagangan internasional merupakan salah satu yang harus dilakukan.

Perdagangan luar negeri adalah pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas negara untuk meningkatkan kemakmuran bangsa tersebut. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya pemilikan peralatan produksi ataupun situasi dan kondisi ekonomi yang dimiliki oleh negara yang satu dengan negara yang lainnya baik dalam bentuk kualitas (mutu) maupun bentuk kuantitas (jumlah). Sedangkan perdagangan internasional adalah transaksi dagang antara para subyek ekonomi neagara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang-barang ataupun jasa perdagangan internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa, hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh:

1. Tidak meratanya pemilihan peralatan produksi ataupun situasi dan kondisi ekonomi negara yang satu dengan yang lain baik dalam bentuk kualitas maupun dalam bentuk kuantitas
2. dengan adanya ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomi tersebut maka terjadilah perbedaan biaya produksi atau suatu barang antar negara yang satu dengan yang lain oleh sebab itu mungkin lebih untung mengimpor suatu barang daripada menghasilkannya sendiri.

BAB III

HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA- MALAYSIA

A. Latar Belakang Terbentuknya AFTA

Berakhirnya perang dingin membawa dampak tersendiri bagi konstelasi ekonomi politik dunia. Sebelumnya dua blok besar yakni blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet berusaha membantu negara satelit mereka pada perekonomian berdasarkan ideologi yang mereka anut. Khusus pada blok barat, bantuan Amerika dan sekutunya seperti finansial pembangunan dan pembukaan pasar bagi produknya kepasar Amerika Serikat, diberikan pada negara non komunis lainnya dalam upaya untuk menangkai pergerakan negara komunis.

Namun pasca perang dingin hubungan antara Amerika Serikat dan negara negara Eropa Barat mulai mengalami perubahan. Ketika pergerakan negara komunis dirasa melemah maka afiliasi keamanan mulai berkurang dan berganti pada kegiatan perekonomian. Seiring dengan semakin mudarnya kekhawatiran pengaruh komunisme, negara Amerika dan Eropa Barat mulai menutup fasilitas yang selama ini diberikan kepada negara non komunis bahkan keterbukaan pasar yang selama ini sebagai fasilitas beralih menjadi produktif. Akibatnya pada negara berkembang sendiri muncul kekhawatiran bahwa munculnya blok ekonomi tadi akan membuat perekonomian mereka terisolasi dari perekonomian dunia.³¹

³¹ John Raven Hill, *Economic Cooperation in Southeast Asia Change Incentives*, dalam *Asian Survey*, No. 9 September 1995

Dalam wilayah ASEAN kondisi tadi dirasa cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran terhadap munculnya regionalisme ekonomi merupakan alasan pertama bagi terbentuknya ide AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), dengan alasan untuk memperkuat *bargaining position* negara-negara ASEAN terhadap blok ekonomi lain. Alasan lainnya yaitu pada awal tahun 1990-an terjadi perpindahan arus investasi cabang-cabang multinasional dari Amerika, Eropa dan Asia Timur serta komunitas-komunitas China di Asia Tenggara ke negara China maka seperti yang disampaikan oleh PM Singapura Goh Chok Tong bahwa ASEAN perlu meningkatkan iklim yang menarik bagi investasi asing sebab bila tidak maka akan berpindah dari Asia Tenggara.³²

Ide pembentukan AFTA kemudian mendapat kesepakatan khususnya pada KTT kepala negara dan pemerintahan ASEAN ke IV, 27-28 Januari 1997 di Singapura yang menandatangani pembentukan AFTA dalam kerangka CEPT (*Common Effective Tariff*) dengan pengurangan tarif perdagangan dalam bidang manufaktur dan produk olahan pertanian menjadi 0%-5% selama 15 tahun di mulai Januari 1993. Namun disepakati pula bila impor menimbulkan ancaman serius pada produk domestik maka CEPT dapat ditangguhkan dalam waktu tertentu.³³

CEPT mempunyai 2 jalur untuk percepatan penurunan tarif melalui jalur cepat untuk mengatur tarif yang masih diatas 20 % dan harus sudah mencapai target 0-5 % pada 1 Januari 2003 terlaksana semua. Sedangkan tarif yang sudah ada 20% menjadi

³² Far Eastern Economic Review, February 6, 1992

³³ John Ravenhill, *op.cit*

0-5% pada 1 Januari 2000. kemudian pada jalur normal tarif diatas 20% akan diturunkan dalam 4 tahap yakni *pertama* harus sudah diturunkan sampai dengan 20% dalam waktu 5-8 tahun dan selesai 1 Januari 2001, kedua pada tanggal 1 Januari 2003 harus sudah diturunkan menjadi 15 %, *ketiga* pada tanggal 1 Januari 2005 sudah harus diturunkan menjadi 10 %, *keempat* pada tanggal 1 Januari 2008 sudah diturunkan menjadi 0-5% (loroan laburo: AFTA in the light of New Economic Developments dalam Southesat Asia Affair 1995, ISEAS, Singapura 1995). Namun di tahun 2010 seluruh ASEAN-6 menjadi 100% dari inclusion List (IL) tarif BM 0%. Sedangkan untuk ASEAN-4 (Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodia) realisasi AFTA dilakukan berbeda yaitu:

- I. Vietnam tahun 2006 (Masuk ASEAN tanggal 28 Juli 1995).
- II. Laos dan Myanmar tahun 2008 (Masuk ASEAN tahun 1997 tanggal 23 Juli).
- III. Cambodia tahun 2010(masuk ASEAN tanggal 30 April 1999)
- IV. Ditahun 2015 seluruh negara ASEAN 4 menjadi 100% dari inclusion List (IL) tarif BM 0 %

Adapun kriteria suatu produk untuk menikmati konsesi CEPT

- Produk terdapat dalam inclusion List baik di negara tujuan maupun negara asal, dengan prinsip timbal balik. Artinya suatu produk dapat menikmati preferensi tarif di negara tujuan eksport (yang tentunya di negara tujuan eksport tersebut sudah ada dalam IL) maka produk yang sama juga harus sudah terdapat dalam IL dari negara asal.

- Memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) yaitu *cumulative ASEAN content* lebih besar atau sama dengan 40 %.
- Produk harus disertai *Certificate of Origin Form D*, yang dapat diperoleh pada kantor dinas atau suku dinas perindustrian dan perdagangan disetiap negara.

Adapun beberapa istilah Daftar Produk CEPT dalam AFTA adalah :

- Inclusion List (IL)
- Temporary Exclusion List (TEL)
- Sensitive List (SL)
- General Exception List (GEL)

Table 1
STRUKTUR TARIF CEPT – AFTA TAHUN 2005

Country	Number of tariff lines in the IL	Percentage
	0-5 %	0-5%
BRUNAI D	9.748	98,23
INDONESIA	11.028	100,00
MALAYSIA	11.672	96,97
FILIPINA	10.901	98,98
SINGAPURA	10.705	100,00
THAILAND	11.020	99,91
ASEAN-6	65.074	98,99
CAMBODIA	1.615	51,85
LAO PDR	8,240	82,21
MYANMAR	9.146	88,07
VIETNAM	8.496	82,67
CLMV	27.497	81,35
TOTAL ASEAN	92.571	93,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Secara garis besarnya latar belakang terbentuknya AFTA yaitu :

Pertama: perubahan eksternal yaitu masa transisi terbentuknya tatanan dunia baru (*new world order*).

- a. Pasca perang dingin
- b. Perkembangan negara – negara komunis
- c. Blok – blok perdagangan
- d. Uruguay round
- e. Semakin ketatnya pasar internasional

Kedua: Perubahan internal yaitu kemajuan ekonomi negara-negara anggota selama 10 tahun terakhir.

- f. Pertumbuhan ekonomi dan ekspor 10 tahun terakhir
- g. Ekonomi yang sudah di verifikasi dan lebih sesama anggota ASEAN

Ketiga : Hasil kerjasama ASEAN PTA yang kurang menggembirakan

Kempat: Menggalang persatuan regional untuk meningkatkan posisi dan daya saing.

Pada dasarnya AFTA merupakan cerminan keinginan terwujudnya integrasi ekonomi regional. Menurut Bela Ballasa ada 5 tahap tercapainya integrasi regional yaitu: (1) zona perdagangan bebas yang melakukan pemberlakuan tarif bagi anggota, (2) Uni Pabean (custom union) yang merupakan kebebasan sirkulasi barang bagi anggota dari menetapkan tarif biasa bagi negara di luar kelompok, (3) pasar bersama pasar faktor produksi meliputi barang, modal, orang dan jasa, (4) uni ekonomi yakni ada harmonisasi politik ekonomi di masing-masing negara, (5) integrasi ekonomi total melalui unifikasi politik dan fiskal.³⁴ Dalam kerangka ideal

³⁴ Asri Warman Adam, *Tantangan ekonomi-Politik Asia Tenggara, tahun 1998*, Suara Pembaharuan 4 Februari 1998 (artikel).

hubungan yang terjadi untuk berlakunya AFTA secara lancar, maka hubungan antar negara-negara ASEAN haruslah dalam kondisi tertib lebih dahulu dalam arti terselesainya permasalahan dalam hubungan antar negara.

Setiap dalam suatu organisasi ataupun bentuk kerjasama lainnya pastilah perselisihan maupun sengketa sering terjadi begitu juga dalam AFTA itu sendiri. Adapun mekanisme sengketa dalam AFTA yaitu bahwa setiap perselisihan atau sengketa dagang antar pelaku usaha di negara anggota ASEAN dapat diproses penyelesaiannya secara formal melalui *Dispute Settlement Mechanism (DSM)* yang dibuat pada tanggal 20 November 1996. Dalam prakteknya protokol tersebut belum sepenuhnya

B. Perkembangan Perdagangan Bilateral Indonesia – Malaysia

Hubungan Indonesia–Malaysia semakin baik terlebih setelah terbentuknya ASEAN. Perekonomian kedua negara semakin meningkat terutama dalam bidang perdagangan. Perdagangan antara negara sangat penting dilaksanakan untuk menunjang pembangunan perekonomian kedua negara tersebut. Peningkatan ekspor sangat dibutuhkan, sementara kebijaksanaan di bidang impor ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan produksi dalam negeri yang baru tumbuh.

Berdasarkan data statistik perdagangan Indonesia–Malaysia dengan negara yang berada di Asia Tenggara lainnya dapat dilihat dari posisi Indonesia yang berada di tempat ketiga setelah Singapura dan Thailand. Namun demikian jika dibandingkan dengan negara tersebut pertumbuhan total perdagangan antara Malaysia

dengan Indonesia selama periode 2002-2006 menunjukkan peningkatan yang relatif cukup besar.

Total perdagangan Indonesia-Malaysia pada periode 2002-2006 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 13,10% per tahun. Peningkatan ini dapat dilihat pada tahun 2002 total perdagangan Indonesia-Malaysia mencapai US\$ 3.067.347,1, tahun 2003 meningkat US\$ 3.502.038,7 namun pada awal 2004 turun menjadi US\$ 4.697.993,5 dan awal Januari-April 2005 menurun sekitar 1,5%, penurunan ini disebabkan karena aktivitas perdagangan kedua negara dikarenakan pergolakan yang terjadi di Indonesia dan Malaysia salah satunya konflik pencaplokan Blok Ambalat serta permasalahan TKI Indonesia yang akhir ini menjadi persoalan yang serius. Beberapa masalah tersebut mempengaruhi aktivitas perdagangan kedua negara tersebut. Meskipun total perdagangan Indonesia dan Malaysia menurun, namun penurunan tersebut tidak terlalu berarti karena Indonesia masih mengalami surplus sebesar US\$ 1,04 miliar pada neraca perdagangan dan pada tahun 2006 neraca perdagangan Malaysia-Indonesia sebesar US\$ 7.304.091,1

Sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 Indonesia terus mengalami surplus pada neraca perdagangan dengan Malaysia. Dimana surplus tersebut meningkat setiap tahunnya

Berikut tabel neraca perdagangan Indonesia – Malaysia tahun 200-2006 :

Table 2

**NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan MALAYSIA
2002 - 2006**

(Nilai : Ribu US\$)

(Kategori)	2002				PERSENTASE (Malaysia) 2006	2005		2004
	2002	2003	2004	2005		2005	2004	
TOTAL PERDAGANGAN	3.067.347,1	3.502.038,7	4.697.993,5	4.579.825,7	19,92	5.579.825,7	7.304.091,1	30,90
MIGAS	358.115,8	392.357,9	666.870,1	885.719,9	22,23	885.719,9	1.909.749,52	115,62
NON MIGAS	2.709.231,3	3.109.680,8	4.031.123,4	4.694.105,9	19,59	4.694.105,9	5.394.341,6	14,92
EKSPOR	2.029.947,4	2.363.850,1	3.016.048,0	3.431.299,7	18,65	3.431.299,7	4.110.757,5	19,80
MIGAS	111.903,2	48.365,3	145.908,0	122.250,5	7,21	122.250,5	321.162,8	162,71
NON MIGAS	1.918.044,2	2.315.484,8	2.870.139,9	3.309.049,2	19,23	3.309.049,2	3.789.594,7	14,52
IMPOR	1.037.399,7	1.138.188,6	1.681.945,6	2.148.526,0	22,16	2.148.526,0	3.193.333,6	48,63
MIGAS	246.212,6	343.992,6	520.962,1	763.469,4	26,38	763.469,4	1.588.586,7	108,07
NON MIGAS	791.187,2	794.196,0	1.160.983,5	1.385.056,7	20,48	1.385.056,7	1.604.746,9	15,86
NERACA PERDAGANGAN	992.547,6	1.225.661,5	1.334.102,4	1.282.773,7	13,98	1.282.773,7	917.423,9	-28,48
MIGAS	-134.309,3	-295.627,3	-375.054,1	-641.218,8	34,23	-641.218,8	-1.267.423,9	97,66
NON MIGAS	1.126.857,0	1.521.288,9	1.709.156,5	1.923.992,5	18,38	1.923.992,5	2.184.847,8	13,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

1. Ekspor Indonesia ke Malaysia

Ekspor Indonesia ke Malaysia selama periode tahun 2002-2006 terus mengalami peningkatan dengan laju rata-rata 18 %pertahun. Pada tahun 2006 ekspor Indonesia ke Malaysia sebesar US\$ 4.110.757,5 di bandingkan pada tahun 2005 yang hanya sebesar US\$ 3.431.299,7, perkembangan ekspor ini sebagian terdiri dari kelompok produk non migas(*oil&gas*). (lihat table di atas)

2. impor Indonesia dari Malaysia

Malaysia berhasil di dalam investasi di sektor industri yang berorientasi ekspor yang didukung dengan berbagai kebijakan memberikan dampak positif terhadap perekonomian serta perdagangan luar negerinya. Ekspor Malaysia ke tiap-tiap negara hampir keseluruhan meningkat tidak terkecuali di Indonesia (lihat table 2). Impor Indonesia dari Malaysia pada tahun 2002 US\$ 1.037.399,7 pada tahun 2003 naik menjadi US\$ 1.138.188,6 dan pada tahun 2004 meningkat sekitar US\$ 1.681.945,6 dan pada tahun 2005 meningkat menjadi US\$ 2.148.526,0 tren 2002-2005 adalah 22,16 % dan akhir 2006 terus meningkat sekitar US\$3.193.333,6

Setelah krisis moneter malanda hampir seluruh kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia-Malaysia kerjasama perdagangan kedua negara terus saja meningkat dimana kedua negara mendapatkan keuntungan dengan kerjasama perdagangan secara keseluruhan impor dari Malaysia terus meningkat diantara kelompok perdagangan antara *petroleum oil, crude* naik sebesar US\$ 216,89 juta menjadi 18% pertahun.*hydrocarbon, nes and their halogenated nitrate* seitar 25 %
Pertahun.

C. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Malaysia

Perdagangan luar negeri bertujuan untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa termasuk jasa konstruksi diarahkan pada penganekaragaman jenis komoditi ekspor serta untuk meningkatkan promosi, didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi, komunikasi dan transportasi serta lembaga keuangan yang handal. Impor barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor, penghematan devisa, dan pola hidup sederhana.

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peranan strategis. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa. Memenuhi kebutuhan pokok rakyat serta sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta upaya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor-sektor lainnya, seperti sektor produksi, keuangan dan perhubungan. Perdagangan juga berperan sangat penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Mengingat betapa pentingnya dan strategisnya peranan perdagangan dalam pembangunan nasional, maka perlu kita perhatikan dengan seksama arahan pembangunan perdagangan pembangunan yang dicanangkan oleh Indonesia yaitu menegaskan bahwa perdagangan dalam negeri dari distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan

konsumen dsalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan , menyebarkan dan pemeratakan hasil pembangunan keseluruh wilayah tanah air sehingga kesempatan berusaha dan lapangan kerja usaha lebih luas serta lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kescjahteraan masyarakat secara khusus kebijakan perdagangan ditujukan untuk :

1. menciptakan sistem perdagangan nasional yang makin efesien dan efektif sehingga dapat membentuk harga yang wajar dan stabil serta dapat memanfaatkan atau memperluas peluang pasar baik didalam maupun diuar negeri.
2. memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya yang terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya.
3. mendorong meningkatkan ekspor khususnya komoditi non migas baik segi komoditi negara tujuan ekspor sehingga tercipta diversifikasi produk dan pasar ekspor Indonesia.
4. mengarahkan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya barang modal bahan baku dan bahan penoligi untuk mengembangkan industri dalam negeri sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
5. untuk mendorong dan mengembangkan usaha kecil yang peranannya semakin besar dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian sehingga

tercipta struktur ekonomi yang semakin kuat yang tidak terpusat pada kelompok usaha tertentu.³⁵

Melalui berbagai kebijakan deregulasi pemerintah telah berusaha menciptakan sistem perdagangan nasional yang semakin efisien dan efektif guna memacu bidang-bidang lain, meningkatkan peranannya terutama dibidang produksi dalam pasar yang terbentuk luas baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Walaupun kebijakan perdagangan diarahkan kepada usaha memperlancar arus barang dan jasa. Di bidang perdagangan luar negeri ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dikaitkan dengan kepentingan nasional. Ini dikarenakan keadaan dan situasi perdagangan internasional sampai saat ini tidak menentu dan masih tetap memperhatikan akibat era globalisasi. Hal ini tersebut ditandai dengan tingkat pertumbuhan volume perdagangan internasional yang belum meyakinkan kelebihan produksi disektor manufaktur, produksi primer dan harga bahan mineral. masalah hutang negara-negara berkembang semakin meningkat yang berakibat terbatasnya kemampuan impor negara berkembang disamping kesulitan mendapat kredit baru pembangunan ekonominya. Semakin meluasnya tindakan proteksionisme, masih adanya ketidakseimbangan tentang cara perdagangan antar negara yang berpengaruh kepada neraca pembangunan masyarakat negara rekan dagang, persaingan antar negara-negara berkembang sendiri dalam memasarkan barang eksportnya dan

³⁵ Anonim, *kebijakan dan langkah penegembangan perdagangan Luar negeri dalam repelita IV*, direktorat Hubungan perdagangan luar negeri: DEPLU RI, Jakarta 1995 hal 3.

mendapat sumber investor serta kecenderungan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di bidang perdagangan luar negeri melalui forum bilateral.

Globalisasi perekonomian dunia tidak dapat dihindarkan lagi akan mempengaruhi proses pembangunan Indonesia dimasa mendatang. Disatu pihak globalisasi tersebut akan mampu bertindak selaku pendorong sebaliknya dilain pihak bukan mustahil pula bahwa hal ini akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Keadaan ini merupakan konsekwensi dari kebijakan ekonomi terbentuk yang diterapkan oleh Indonesia selama ini. Dalam keadaan demikian kebijakan ekonomi global merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kebijaksanaan ekonomi nasional. Hal ini terlihat nyata dari peran aktif Indonesia dalam menghadapi perundingan putaran Uruguay yang bermaksud untuk menciptakan suatu modal pasar bebas dunia.

Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan bahwa kebijaksanaan pembangunan perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri sehingga lebih memperlancar arus barang dan jasa, mendorong pembentukan harga yang layak dalam iklim persaingan yang sehat menunjang efisiensi produksi mengembangkan ekspor, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan dan merataan pendapatan rakyat serta memantapkan stabilitas ekonomi.³⁶

³⁶ Ceramah Direktur Hubungan Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagagn Pada Acara Penyegaran Pembekalan Bagi Pejabat Dinas Luar Negeri Departemen Luar Negeri , Jakarta 28 Maret 1995, Hal 2

Dengan adanya kebijaksanaan pembangunan perdagangan luar negeri yang ditetapkan dalam GBHN maka pemerintah Indonesia dapat melaksanakan hubungan bilateral dengan negara negara lain yang berada di dunia seperti halnya kerjasama antara Indonesia-malaysia yang telah lama berlangsung sehingga tidak menutup kemungkinan kerjasama ini dapat dikembangkan melalui AFTA dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan sesuatu kerjasama yang saling menguntungkan sesuai yang tertuang dalam kebijakan luar negeri masing masing negara. Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dimana Malaysia memiliki berbagai lapangan kerja, memiliki modal serta beberapa tenaga ahli serta teknologi yang lumayan baik serta Malaysia juga menginginkan tenaga kerja yang baik dan handal dari negara Indonesia dimana Indonesia memiliki memiliki warga yang cukup besar untuk wilayah asia tenggara. Dengan adanya kebijakan perdagangan luar negeri tersebut Indonesia dan Malaysia dapat bekerjasama dengan baik dari dulu hingga sekarang. Negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah jepang, amerika serikat , ASEAN utamanya Malaysia dan singapura serta MEE yang secara keseluruhannya mencakup lebih dari 80% total ekspor setiap tahunnya. Sedangkan di bidang impor sama halnya dengan ekspor negara-negara utama asal impor Jepang, ASEAN, AS,dan MEE yang mencakup sekitar 70% dari total impor Indonesia, khususnya untuk negara negara ASEAN lebih 55 % berasal Malaysia, sedangkan dari MEE sekitar 45% berasal dari Jerman.

Barang dagang Indonesia akan kalah bersaing dengan negara-negara lain yang mengekspor barang dagang yang sama. Untuk itu pemerintah Indonesia

mengambil beberapa kebijaksanaan untuk meningkatkan kualitas ekspor yaitu dengan menggunakan teknologi yang lebih maju sehingga lebih efisien dan efektif dan mutunya meningkat. Pada dasarnya perekonomian kedua negara ini dapat dikatakan tergantung pada hasil-hasil pertanian dan saat ini Indonesia khususnya tengah berjuang menuju tatap industri tingkat menengah atas serta mengeksplorasi hasil-hasil tambang yang selama ini telah dikembangkan. Dengan itu maka Indonesia berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan membuka peluang bagi investor asing agar mau untuk menanamkan modalnya atau mendapatkan bantuan luar negeri. Dengan hadirnya modal-modal asing diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dalam negeri Indonesia yang mulai rapuh ini. Namun disisi lain Indonesia juga memiliki banyak tenaga kerja yang dapat diandalkan guna ditempatkan di luar negeri. Seperti selama ini TKI Indonesia banyak dikirim ke Arab Saudi, Hongkong, Jepang, Cina, Eropa serta Malaysia khususnya.

Berikut neraca perdagangan dengan beberapa negara ASEAN yang bekerjasama dengan Indonesia dimana kerjasama ini terjalin demi meningkatkan keuntungan bagi negara sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Table 3

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA dengan BRUNAI DARUSALAM 2001 -2006

(Nilai : Ribu US\$)

Kategori	2001		2002		2003		2004		Saldo
	Nilai	Saldo	Nilai	Saldo	Nilai	Saldo	Nilai	Saldo	
TOTAL PERDAGANGAN	58.752,2	66.809,6	147.362,2	327.005,4	1.236.830,3	115,59	1.236.830,3	1.644.490,8	32,96
MIGAS	35.892,6	33.082,1	113.275,1	291.625,3	1.190.066,7	150,40	1.190.066,7	1.602.755,3	34,68
NON MIGAS	22.859,6	33.727,5	34.087,2	35.380,1	46.763,7	15,94	46.763,7	41.735,4	-10,75
EKSPOR	21.614,9	32.103,7	30.389,3	31.761,8	39.332,0	12,60	39.332,0	37.557,9	-4,51
MIGAS	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,00	0,1	0,0	100,00
NON MIGAS	21.613,5	32.103,7	30.389,3	31.761,8	39.331,9	12,60	39.331,9	37.557,9	-4,51
IMPOR	37.137,3	34.705,9	116.972,9	295.243,6	1.197.498,4	148,13	1.197.498,4	1.606.932,9	34,19
MIGAS	35.891,3	33.082,1	113.275,1	291.625,3	1.190.066,6	150,40	1.190.066,6	1.602.755,4	34,66
NON MIGAS	1.246,0	1.623,8	3.697,8	3.618,4	7.431,7	54,85	7.431,7	4.177,5	-43,79
NERACA PERDAGANGAN	-15.522,5	2.602,2	86.583,6	263.481,9	1.158.166,4	275,93	1.158.166,4	1.569.374,9	35,51
MIGAS	-35.889,9	33.082,1	113.275,1	291.625,3	1.190.066,6	150,40	1.190.066,6	1.602.755,4	34,68
NON MIGAS	20.367,5	30.479,9	26.691,5	28.143,4	31.900,2	8,52	31.900,2	33.380,5	4,54

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Table 4
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan THAILAND
2001 - 2006

(Nilai : Ribu US\$)

Kategori	2001-2006					Rasio 2006/2001	Rasio		Perubahan
	2001	2002	2003	2004	2005		2001	2006	
TOTAL PERDAGANGAN	2.049.668,7	2.418.060,3	3.094.300,7	4.747,819,6	5.693,418,1	31,23	5.693,418,1	5.685.031,5	-0,15
MIGAS	158.778,6	373.394,0	468.229,5	834.838,7	693,847,9	45,56	693.847,9	668.573,20	-3,64
NON MIGAS	1.890.890,1	2.044.666,3	2.626.071,2	3.912,980,9	4.999,570,2	29,61	4.999,570,2	5.016.458,3	0,34
EKSPOR	1.063.621,3	1.227.351,7	1.392.632,7	1.976,236,3	2.246,458,7	21,79	2.246,458,7	2.701.548,7	20,26
MIGAS	90.273,6	254.203,3	310.310,3	427,161,0	328,930,5	36,41	328.930,5	647.429,0	96,83
NON MIGAS	973.347,7	973.148,4	1.082.322,3	1.549,075,2	1.917,528,2	19,97	1.917,528,2	2.054.119,7	7,12
IMPOR	986.047,4	1.190.708,7	1.701.668,1	2.771,583,3	3.446,959,4	39,77	3.446,959,4	2.983.482,8	-13,45
MIGAS	68.505,0	119.190,7	157.919,2	407,677,7	364,917,4	58,02	364.917,4	21.144,2	-94,21
NON MIGAS	917.542,4	1.071.517,9	1.543.748,9	2.363,905,6	3.082,042,0	37,91	3.082,042,0	2.962.338,6	-3,88
NERACA PERDAGANGAN	77.573,9	36.643,0	-309.035,4	795.347,0	1.200,500,7	0,00	1.200,500,7	-281.934,2	-76,52
MIGAS	21.768,5	135.012,6	152.391,2	19.483,4	35.986,9	0,00	35.986,9	626.284,7	-1.840,32
NON MIGAS	55.805,3	-98.369,5	-461.426,6	814.830,4	1.164,513,8	0,00	1.164,513,8	-908.218,9	-22,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Table 5
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan Myanmar
2001 - 2006

(Nilai : Ribu US\$)

Kategori	2001					Rasio (%) 2001-2006	2002		2003	2004
	2001	2002	2003	2004	2005		2006			
TOTAL PERDAGANGAN	264.756,5	228.109,9	300.453,5	191.660,3	289.545,2	0,05	289.545,2	408.560,8	41,10	
MIGAS	1.710,8	44,8	29,5	2.644,5	3.483,5	73,33	3.483,5	27.395,73	686,43	
NON MIGAS	263.045,7	228.065,1	300.424,0	189.015,8	286.061,7	-0,20	286.061,7	381.165,1	33,25	
EKSPOR	0,0	0,0	0,0	140,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
MIGAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
NON MIGAS	0,0	0,0	0,0	140,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00	
IMPOR	264.756,5	228.109,9	300.453,5	191.519,9	289.545,2	0,04	289.545,2	408.560,8	41,10	
MIGAS	1.710,8	44,8	29,5	2.644,5	3.483,5	73,33	3.483,5	27.395,7	686,43	
NON MIGAS	263.045,7	228.065,1	300.424,0	188.875,4	286.061,7	-0,21	286.061,7	381.165,1	33,25	
NERACA PERDAGANGAN	264.756,5	228.109,9	300.453,5	191.379,5	289.545,2	0,03	289.545,2	408.560,8	41,10	
MIGAS	-1.710,8	-44,8	-29,5	-2.644,5	-3.483,5	73,33	-3.483,5	-27.395,7	686,43	
NON MIGAS	263.045,7	228.065,1	300.424,0	188.735,0	286.061,7	-0,22	286.061,7	381.165,1	33,25	

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Table 6
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan SINGAPURA
2001 - 2006

(Nilai : Ribu US\$)

Kategori	2001					2006	2001-2006		2006
	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai		Perubahan % 2001-2006	2001	
TOTAL PERDAGANGAN	8.510.886,0	9.448.715,5	9.554.783,0	12.080.670,4	17.306.103,1	18,12	17.306,1 03,1	18.964,3 84,0	9,58
MIGAS	1.758.463,6	2.704.654,2	2.935.544,7	4.162.624,1	7.300.637,4	38,79	7.300,63 7,4	7.406,80 0,74	1,45
NON MIGAS	6.752.422,4	6.744.061,3	6.619.238,3	7.918.046,2	10.005.465,7	9,93	10.005,4 65,7	11.557,5 83,3	15,51
EKSPOR	5.363.830,0	5.349.083,8	5.399.657,7	5.997.898,3	7.835.385,1	9,12	7.835,38 5,1	8.929,84 5,2	13,97
MIGAS	710.654,3	657.864,6	622.636,7	607.226,4	766.783,6	0,73	766,783, 6	1.105,69 5,1	44,20
NON MIGAS	4.653.176,5	4.691.419,2	4.777.020,9	5.390.671,9	7.068.601,5	10,24	7.068,60 1,5	7.824,15 4,1	10,69
IMPOR	3.147.055,3	4.099.631,7	4.155.125,3	6.082.772,1	9.470.718,0	29,67	9.470,71 8,0	10.034,5 34,8	5,95
MIGAS	1.047.809,3	2.046.989,6	2.312.907,9	3.555.397,7	6.533.853,8	52,39	6.533,85 3,8	6.301,10 5,6	-3,56
NON MIGAS	2.099.245,9	2.052.642,1	1.842.217,4	2.527.374,3	2.936.864,2	9,19	2.936,86 4,2	3.733,42 9,2	27,12
NERACA PERDAGANGAN	2.216.775,5	1.249.452,1	1.244.532,3	-84.873,8	1.635.333,0	0,00	1.635,33 3,0	1.104,68 5,6	-32,45
MIGAS	-337.155,1	1.389.325,1	1.690.271,2	2.948.171,3	5.767.070,2	90,24	5.767,07 0,2	5.195,41 0,5	-9,91
NON MIGAS	2.553.930,6	2.638.777,1	2.934.803,5	2.863.297,5	4.131.737,2	11,00	4.131,73 7,2	4.090,72 4,9	-0,99

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Table 7
NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan MALAYSIA
2001 - 2006

(Nilai : Ribu US\$)

KATEGORI	2001	2002	2003	2004	2005	2006	PERDAGANGAN		2001-2006
							2001-2002	2003-2006	
TOTAL PERDAGANGAN	2.784.089,8	3.067.347,1	3.502.038,7	4.697.993,5	5.579.825,7	19,92	5.579.825,7	7.304.091,1	30,90
MIGAS	443.037,0	358.115,8	392.357,9	666.870,1	885.719,9	22,23	885.719,9	1.909.749,52	115,62
NON MIGAS	2.341.052,8	2.709.231,3	3.109.680,8	4.031.123,4	4.694.105,9	19,55	4.694.105,9	5.394.341,6	14,92
EKSPOR	1.778.626,2	2.029.947,4	2.363.850,1	3.016.048,0	3.431.299,7	18,65	3.431.299,7	4.110.757,5	19,60
MIGAS	98.576,5	111.903,2	48.365,3	145.908,0	122.250,5	7,21	122.250,5	321.162,8	162,71
NON MIGAS	1.680.049,7	1.918.044,2	2.315.484,8	2.870.139,9	3.309.049,2	19,23	3.309.049,2	3.789.594,7	14,52
IMPOR	1.005.463,7	1.037.399,7	1.138.188,6	1.681.945,8	2.148.526,0	22,16	2.148.526,0	3.193.333,6	48,63
MIGAS	344.460,5	246.212,6	343.992,6	520.962,1	763.469,4	26,39	763.469,4	1.588.586,7	108,07
NON MIGAS	661.003,2	791.187,2	794.196,0	1.160.983,5	1.385.056,7	20,48	1.385.056,7	1.604.746,9	15,86
NERACA PERDAGANGAN	773.162,5	992.547,6	1.225.661,5	1.334.102,4	1.282.773,7	13,98	1.282.773,7	917.423,9	-28,48
MIGAS	245.884,0	-134.309,3	295.627,3	-375.054,1	641.218,8	34,23	641.218,8	-1.267.423,9	97,56
NON MIGAS	1.019.046,5	1.126.857,0	1.521.288,9	1.709.156,5	1.923.992,5	18,30	1.923.992,5	2.184.847,8	13,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

Malaysia dipihak lain ingin meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara-negara lain dengan meningkatkan daya saing komoditi ekspor dan meningkatkan investasi di dalam negeri maupun meningkatkan investasi negaranya di luar negeri yang berpengaruh dengan kebutuhan bahan baku industri yang selanjutnya naiknya non-oil domestic ekspor. Perdagangan luar negeri Malaysia meningkat dengan pertumbuhan rata-rata 40 % setahun sejak 1990, disisi lain pemerintah Malaysia juga berusaha meningkatkan industri namun disisi lain membutuhkan tenaga kerja yang terampil, ulet dan dapat diandalkan guna menopang perindustrian negerinya. Dalam kebijakan perdagangan luar negerinya, Malaysia berkomitmen dalam merealisasikan AFTA sehingga dapat mendorong sinergi ke depan bagi pertumbuhan nasional negaranya, Malaysia berupaya meningkatkan sektor-sektor industri jasa dan investasi yang berada di daerahnya. Jadi tidak menutup bahwa kedua negara sama-sama ingin meningkatkan ekonominya sebagai mana sebagai anggota ASEAN.

Melihat pertimbangan tersebut maka sistem pemerintahan mengambil langkah langka kearah terciptanya kerjasama regional di Asia Tenggara. Maka tidaklah heran jika realisasi AFTA mesti dipercepat dan merupakan salah satu komitmen bagi kedua negara ini.

Table 8

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TOTAL

(Nilai : Juta US\$)

(G)	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 EKSPOR	56.320,9	57.158,8	61.058,2	71.584,6	85.660,0	11,22	77.536,4	91.182,6	17,61	
2 MIGAS	12.636,3	12.112,7	13.651,4	15.645,3	19.231,6	11,58	17.406,6	19.300,3	10,88	
3 NON MIGAS	43.684,6	45.046,1	47.406,8	55.939,3	66.428,4	11,12	60.129,8	71.882,3	19,56	
4 IMPOR (**)	30.962,1	31.288,9	32.550,7	46.524,5	57.700,9	17,84	52.811,4	58.055,1	8,14	
5 MIGAS	5.471,9	6.525,7	7.610,9	11.732,0	17.457,7	33,73	16.116,4	17.585,0	9,11	
6 NON MIGAS	25.490,3	24.763,1	24.939,8	34.792,5	40.243,2	13,35	36.695,0	38.470,1	4,84	
7 TOTAL	87.283,0	86.447,6	93.608,9	118.109,1	143.360,8	13,67	130.347,8	147.247,7	12,97	
8 MIGAS	18.108,2	18.638,4	21.262,3	27.377,4	36.689,3	19,68	33.523,0	36.885,3	10,03	
9 NON MIGAS	69.174,9	69.809,2	72.346,6	90.731,8	106.671,6	11,95	96.824,8	110.362,4	13,98	
10 NERACA	25.358,8	25.869,9	28.507,6	25.060,1	27.959,1	1,65	24.725,0	35.137,5	42,11	
11 MIGAS	7.164,5	5.587,0	6.040,5	3.913,3	1.773,9	-27,01	1.290,2	1.715,3	32,95	
12 NON MIGAS	18.194,3	20.282,9	22.467,0	21.146,8	26.185,1	8,00	23.434,8	33.422,2	42,62	

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perdagangan

Keterangan : *) Angka sementara

***) Belum termasuk impor Batam dan Kawasan Berikat

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor Komplementaris Perdagangan Bilateral Indonesia – Malaysia dalam Kerangka AFTA

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu faktor penting dalam struktur perekonomian setiap negara, disebabkan perdagangan luar negeri di gunakan untuk menunjang devisa dan peningkatan ekspor yang dibutuhkan. Sementara kebijakan di bidang impor di tujukan untuk melindungi dan mengembangkan produksi dalam negeri yang baru tumbuh dalam kaitannya dengan perdagangan luar negeri antara Indonesia dengan Malaysia, pemerintah Indonesia telah cukup banyak mengambil langkah-langkah atau kebijakan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.

Hubungan Indonesia-Malaysia berkembang kearah yang lebih baik sejauh ini pembangunan nasional Indonesia lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut yang menjadi andalan Indonesia adalah perdagangan luar negeri melalui perdagangan luar negeri Indonesia dapat meningkatkan kerjasama antar Negara. produk-produk ekspor Indonesia sangat bersaing oleh Negara-negara di dunia.

Indonesia sebagai kelompok negara berkembang tidak lepas dari ketergantungan negara lain untuk memasarkan perdagangan luar negerinya begitupun halnya dengan Malaysia untuk saling mengisi dan ketergantungan satu dengan lainnya. Perdagangan Indonesia-Malaysia sebelum terbentuknya ASEAN apalagi

kerjasama melalui pola AFTA oleh sebab itu boleh dikatakan kurang berkembang. lainnya halnya dengan setelah hadirnya ASEAN perdagangan kedua negara semakin meningkat terlebih lagi kerjasama perdagangan melalui AFTA ini seiring perkembangan ASEAN.

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerjasama bilateral untuk menghindari pengenaan pajak berganda bagi warga negara maupun perusahaan dari kedua negara. Di mana telah ditandatangani kerjasama yang tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan di sela-sela pertemuan Tingkat Tinggi tahunan Indonesia-Malaysia yang disaksikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Da'to Sri Abdullah Ahmad Badawi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selain MoU penghindaran pajak berganda, kedua negara juga sepakat melakukan pengawasan terutama di lintas batas masing-masing negara serta kerjasama bidang bisnis dan investasi di berbagai sektor.

Sebagai sesama anggota negara ASEAN dan merupakan negara yang berkembang dan dilihat dari segi geografis Indonesia dan Malaysia memiliki potensi sama namun masing-masing negara memiliki nilai tambah yang dihasilkan kedua negara berbeda. Menurut bank dunia dalam ukuran ekonomi Malaysia jauh lebih maju dari Indonesia yaitu dengan GNP perkapita sebesar US\$ 3.140 pertahun sedangkan Indonesia pada tahun 1993 sebesar US\$ 740 pertahun. Ini berarti Malaysia merupakan negara yang tergolong dalam kelompok *upper middle economy*, sedangkan Indonesia merupakan kelompok *lower middle economy*.

Meskipun, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang hampir sama namun Indonesia dan Malaysia saling melengkapi atau komplementaris dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terlihat dari kegiatan ekspor dan impor kedua belah pihak, neraca perdagangan Indonesia dan Malaysia pada periode 2002 Sampai 2006 selalu mencatat defisit bagi Malaysia yang berbanding terbalik dengan Indonesia, seperti yang telah diuraikan sebelumnya. ekspor Indonesia ke Malaysia tahun 2006 memncatat nilai tertinggi yaitu US\$ 3.789.594,7 ribu untuk kelompok non migas dan ditahun yang sama ekspor mata dagangan tercatat sekitar US\$ 2.701.548,7 ribu ke Thailand, Jerman sekitar US\$ 982.071,5 ribu serta beberapa negara lainnya. Ketergantungan Malaysia terhadap kebutuhan akan komoditi Indonesia yang menjadikan Malaysia sebagai salah satu pembeli utama terutama sebelum periode 2002-2006 tercatat beberapa barang dagangan antara lain: perlengkapan mesin kantor/pengolahan data atau ketegori barang non migas, empat terakhir mengalami peningkatan terhitung dari tahun 2002 sebesar US\$.1.680.049,7 ribu tahun 2003 meningkat menjadi US\$ 2.315.484,8 ribu ditahun 2004 meningkat menjadi US\$ 2.870.139,9 ribu dan ditahun 2005 US\$ 3.309.049,2 ribu dan akhir tahun 2006 menjadi US\$ 3.789.594,7 ribu.

Dari sekian banyak produk baik pertanian, perkebunan, maupun perikanan beberapa diantaranya mengalami peningkatan ekspor ke Malaysia yang cukup pesat salah satunya *coffe*. Disektor lain permintaan Malaysia akan kebutuhan hasil tambang Indonesia cukup baik diantaranya aluminium pada tahun 2002 sebesar US\$ 2,934,4 ribu meningkatpada tahun 2003 menjadi US\$ 8,841,7 ribu dan pada akhir tahun 2006

meningkat menjadi US\$ 15,228,5 ribu. Demikian copper diakhir tahun 2006 bernilai US\$ 25,530,5 ribu.

Jenis produk yang menjadi andalan Indonesia terhadap Malaysia yang mampu memberikan kontribusi yang positif bagi komplementaris kedua negara tersebut adalah kertas dan kertas karton (*paper and paper board*) yang meningkat sekitar 85 % dari tahun sebelumnya yang hanya 62%, minyak nabati lainnya mencapai nilai tertinggi dan mengalami peningkatan dari US\$ 146, 133,0 meningkat diakhir tahun 2006 menjadi US\$ 108 205,8 ribu.

Dari dalam negeri Indonesia, Malaysia merupakan salah satu dari lima pemasok utama untuk 9 dari 101 jenis barang menurut negara asal selama sedikitnya lima tahun terakhir 2002-2006. adapun jenis barang dari kesembilan mata jenis dagangan tersebut diantaranya binatang ternak, mebel sepatu, daging kering, susu dan produk susu dan mantega, peralatan komunikasi , kertas dan juga pupuk yang merupakan komoditi yang mengalami pertumbuhan cukup berarti di Indonesia. Selain dari sembilan jenis mata dagangan tersebut, Malaysia ternyata mampu menyaingi negara-negara lain untuk mata dagangan berupa *petroleum oil, crude* dimana pasokan komoditi tersebut semakin meningkatnya permintaan Indonesia yang tercatat sekitar US\$ 216. 899,8 ribu. Untuk tahun 2002-2006 tercatat *petroleum oil crude* mencatat nilai tertinggi diantara komoditi barang masuk di Indonesia.

Namun kebutuhan Indonesia akan pasokan barang/komoditi dari Malaysia berupa besi kasar, besi cor, dan besi beton tersebut di tahun 2003 sempat menurun sampai 25%. Penurunan nilai ekspor Malaysia ke Indonesia sedikit banyaknya di

pengaruhi beberapa gejolak politik yang terjadi di kedua negara yang salah satunya akibat kasus blok ambalat maupun kasus TKI yang sampai sekarang masih belum ada titik temunya atau penyelesaian yang baik. Jadi faktor komplementaris/faktor saling melengkapi antara Indonesia dan Malaysia di mana tiap-tiap negara memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang dapat saling melengkapi.

B. Faktor Penghambat Hubungan Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka AFTA.

Hubungan Indonesia Malaysia secara umum berjalan dengan baik terutama dari segi perdagangan yang komplementaris di kedua negara tersebut. Terlebih lagi di bentuknya Free Trade Area di Asean dimana diketahui merupakan wilayah perdagangan bebas dan menghapuskan tarif bea masuk. Namun jika dilihat dari kedua negara tersebut sering terlihat konflik. Selain dari beberapa masalah lain yang akan dibahas bagi penulis, ada hal masalah peningkatan ekspor Indonesia ke Malaysia pada kerangka AFTA.

Struktur perekonomian Indonesia bersifat ekspor *economies* artinya ekonomi yang bersifat mengandalkan ekspornya sebagai salah andalan sumber devisa negara untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang sedang digalangkan. Perubahan yang cepat dan cenderung tidak menentu serta semakin ketatnya persaingan pasar sekarang ini menuntut peningkatan strategi dan langkah-langkah operasional untuk penciptaan iklim usaha yang mendorong dunia usaha semakin meningkatkan efisiensi daya saingnya.

Dalam keadaan seperti ini yang diperlukan adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar bagi hasil produksi nasional baik lewat perdagangan internasional dalam kerangka multilateral, regional, bilateral dalam penetrasi dunia usaha pasaran internasional dengan berbagai pendekatan. Dalam hubungan ini pemerintah di harapkan makin memainkan peranan sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada dunia usaha. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan tanpa menghilangkan campur tangan pemerintah yang diperlukan, khususnya yang memberikan arah mendorong prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat. Dalam rangka itu untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Malaysia terdapat beberapa hal yang dapat menghambat ekspor tersebut antara lain:

Pertama, sarana transportasi atau kapal pengangkut barang-barang ekspor belum memadai. Untuk memasarkan barang-barang atau hasil industri diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai di mana sarana dan prasarana transportasi sangat memegang peranan penting dalam memasarkan produk atau hasil industri baik dalam negeri maupun luar negeri. Selama ini sering dialami para eksportir kita bahwa keterlambatan produk mereka tiba di pasaran Malaysia.

Kedua, adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap pengusaha nasional yang ingin mengembangkan usahanya, maksudnya ada pengusaha yang diberi kemudahan dalam usahanya misalnya memperoleh izin baru mendirikan proyeknya meskipun secara tidak prosedur dikarenakan mereka ini mempunyai koneksi yang kuat. Dipihak lain ada pengusaha yang sengaja dibatasi ruang geraknya dengan dalil yang tidak

masuk akal. Sikap pemerintah yang demikian dapat mematikan semangat para pengusaha. Sebagai akibatnya produk yang ingin diekspor semakin berkurang karena dibatasi ruang geraknya.

Ketiga, kualitas sumber daya masyarakat di Indonesia relatif masih rendah yang dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Keempat, sistem birokrasi yang berbelit-belit, misalnya pegurusan dokumen untuk ekspor barang dan jasa, hal ini tidak efisien karena selain butuh banyak waktu juga membutuhkan banyak biaya.

Kelima, kurangnya pengalaman pengusaha Indonesia terjun dipasaran global.

Selain itu masalah yang dihadapi dalam peningkatan investasi dan ekspor Malaysia ke Indonesia adalah kesiapan infrastruktur Indonesia belum mendukung pelaksanaan proyek-proyek asing langsung khususnya kondisi infrastruktur di luar pulau Jawa, Sumatra dan Sulawesi dimana hingga saat penyediaan tenaga air, listrik maupun transportasi di luar Jawa, Sumatra maupun Sulawesi kurang memadai. Hal ini akan menghambat realisasi proyek-proyek yang sudah di setujui. Di samping itu tingginya suku bunga dan inflasi di Indonesia, sebagai akibat dari tingginya suku bunga dan inflasi maka para pengusaha dari Malaysia kesulitan memperoleh kredit untuk mengembangkan usahanya, dengan demikian volume produksi akan berkurang. Menurut hasil penelitian ASEAN institute of management dalam lima tahun terakhir suku bunga di Indonesia rata 7,5 % pertahun selama inflasi tinggi sulit menurunkan suku bunga.

Dari beberapa hal masalah hambatan hubungan perdagangan Indonesia-Malaysia, penulis juga mengajukan beberapa deskripsi hambatan yang dapat mengganggu perdagangan kedua negara ini yaitu hambatan dari segi politik, militer dan keamanan, ekonomi kedua negara tersebut.

Bidang Politik

Hubungan politik Indonesia-Malaysia dapat disebut sebagai suatu hubungan "penguyuban" atau kekeluargaan. Dari satu sisi hubungan tersebut merupakan kemesraan antara kedua negara tersebut. Disisi lain menyembunyikan sejumlah persoalan yang sulit penyelesaiannya.

Hubungan Indonesia dengan negara tetangganya itu menyembunyikan sekurang-kurangnya kekhawatiran yang timbul disisi aktual dan sisi persepsual. Dari sisi aktual adanya beberapa masalah yang belum terselesaikan diantara Indonesia dengan Malaysia. meskipun dapat diredam menjadikan hubungan itu seringkali terasa ganjal. Masalah yang sangat menonjol diantara hubungan Indonesia menyangkut

a. Blok Ambalat.

Keputusan Malaysia untuk memberikan konsesi penambangan dan pengelolaan minyak di kawasan Ambalat kepada Royal Dutch Shell dan perusahaan lain pada bulan Februari 2005 telah mengundang reaksi yang cukup keras dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Keputusan ini mengindikasikan bahwa Malaysia yakin Ambalat berada di dalam teritori mereka. Sementara itu, Indonesia sendiri yakin bahwa Ambalat adalah bagian dari Indonesia. Hal ini didukung oleh fakta historis bahwa Ambalat dulunya adalah bagian dari Kesultanan Bulungan yang

akhirnya menjadi bagian Indonesia sejak kemerdekaan. Argumentasi semacam ini dikenal sebagai argument rantai kepemilikan atau *chain of title*. Reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat bisa dipahami karena belum lagi sembuh luka bangsa Indonesia dengan terlepasnya dua pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, kini Malaysia mencoba merebut wilayah lain yang diyakini sebagai wilayah Indonesia. Meskipun secara historis kedua pulau tersebut juga bagian dari Kesultanan Bulungan, toh akhirnya *International Court of Justice* (ICJ) memenangkan Malaysia.

Keputusan ini, salah satunya karena Pemerintah Indonesia terbukti gagal memberi perhatian kepada pengelolaan lingkungan kedua pulau tersebut dalam penyelesaian konflik ini tidaklah mudah. Untuk menyelesaikan persoalan klaim yang tumpang tindih ini, harus dilihat kembali rangkaian proses negosiasi antara kedua negara berkaitan dengan penyelesaian perbatasan di Pulau Kalimantan yang sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1974. Diketahui secara luas bahwa Perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi, di mana Ambalat berada, memang belum terselesaikan secara tuntas. Ketidaktuntasan ini sesungguhnya sudah berbuah kekalahan ketika Sipadan dan Ligitan dipersoalkan dan akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Jika memang belum pernah dicapai kesepakatan yang secara eksplisit berkaitan dengan Ambalat maka perlu dirujuk kembali Konvensi Batas Negara tahun 1891 yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris sebagai penguasa di daerah tersebut di masa kolonialisasi. Konvensi ini tentu saja menjadi salah satu acuan utama dalam penentuan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Perlu diteliti apakah Konvensi tersebut secara eksplisit memuat/mengatur kepemilikan

Ambalat. Hal ini sama halnya dengan penggunaan Traktat 1904 dalam penegasan perbatasan RI dengan Timor Leste. Namun sesungguhnya segala persoalan Indonesia Malaysia bagi kedua belah pihak dan wajib saling menghormati dengan menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik. Pemahaman yang baik dari segi ilmiah, teknis dan hukum yang baik oleh kedua pihak diharapkan akan mengurangi langkah-langkah provokatif yang tidak perlu. Pemahaman seperti ini tentu saja tidak cukup bagi pemerintah saja, melainkan juga masyarakat luas untuk bisa memahami dan mendukung terwujudkannya penyelesaian yang adil dan terhormat karena ditinjau bahwa kedua negara tersebut masih memiliki kerjasama lainnya demi kepentingan kedua negara tersebut seperti kerjasama perdagangan misalnya hal ini dapat diketahui kerjasama perdagangan dalam kerangka AFTA.

b. TKI Ilegal

Masalah pendatang tanpa izin atau TKI ilegal di Malaysia dapat berkembang menjadi politis jika tidak di tangani secara hati-hati jumlah orang yang bekerja di semenanjung Malaysia semakin meningkat tiap tahunnya banyak dari mereka ke negeri Jiran tersebut secara ilegal. Kehadiran mereka telah menciptakan masalah karena situasi ini memperburuk pengangguran Malaysia, hal ini juga menimbulkan amarah beberapa orang Malaysia karena timbulnya kegiatan criminal dan penyakit diantara imigran Indonesia yang tergolong tinggi. Pemerintah Malaysia merasa kehadiran TKI ilegal tersebut sebagai beban dan banyak masalah-masalah sosial di Malaysia dikaitkan dengan pekerja ilegal tersebut. Pemerintah Malaysia sejak tahun 1992 telah beberapa kali mengadakan program pengampunan pendatang tanpa izin

tersebut. Untuk mencegah terus mengalirnya TKI ilegal pemerintah Malaysia telah meminta kerjasama pemerintah Indonesia untuk mengawasi pintu-pintu masuk di sepanjang perairan kedua negara.

c. Batas ZEE di Selat Malaka.

Masalah belum adanya penetapan garis ZEE di selat malaka antara Indonesia dan Malaysia sering menimbulkan masalah pelanggaran di wilayah perairan oleh nelayan kedua negara. Masalah tersebut telah di bahas dalam pertemuan komisi bersama Indonesia- Malaysia. Pada prinsipnya kedua negara menyetujui batas ZEE di selat malaka di selesaikan dengan baik. Pemerintah Malaysia juga menginginkan agar perundingan garis ZEE di perbatasan Malaysia dapat terselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan konflik baru atau masalah nantinya.

d. Masalah Haze (Kebakaran Hutan)

Masalah haze yang melanda Malaysia di sebabkan kebakaran hutan di Indonesia dimana hampir tiap tahunnya kebakaran hutan Indonesia sering terjadi dimana dapat mempengaruhi hubungan kedua negara. Masalah haze di Indonesia telah berubah menjadi *tranboundary pollution* yang ditangani secara global. Masalah tersebut telah menarik perhatian bukan saja pemerintah Malaysia tapi juga badan badan NGO yang berada di Malaysia.

Belum terselesaikannya masalah masalah aktual seharusnya di tangani secara rasional itu sehingga sekarang masih menyembunyikan perasaan di antara kedua negara. Perasaan itu bersumber pada kepercayaan bahwa kedua negara adalah satu keluarga, satu rumpun yang dapat menyelesaikan semua persolan dengan baik akan

tetapi penyelesaian Blok ambalat yang sampai saat ini belum diketahui kejelasannya 100% serta kasus sipadan-ligitan yang pernah menjadi persolan yang sangat merugikan pemerintah Indonesia oleh sebagian kalangan masih dianggap masalah kecil yang tidak seharusnya menunjukkan betapa kikuknya penyelesaian masalah itu.

Hubungan formil kedua negara bertetangga sejak turunnya presiden soeharto tahun 1998 menuju titik turun dimulai dari kecenderungan pemerintahan habibie kepada wakil perdana Menteri(yang di berhentikan) Anwar Ibrahim yang diajukan kepengadilan adanya pernyataan perdana Menteri Mahatir Mohammad yang dianggap sebagai "New Kid on the Blok" terjadinya kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi di kedua negara tersebut. Hingga pemerintahan Sisilo Bambang Yudoyono masalah TKI illegal merupakan masalah serius yang menyebabkan terganggunya hubungan kedua negara tersebut

Dari sudut pandang, pandangan Malaysia yang umumnya melihat Indonesia sebagai saudara tua menyembunyikan ketakutan tentang kemungkinan saudara tua yang mendominasi, jika tidak mengancam saudara yang lebih muda. Dalam alam psikologis seperti saudara tua di tuntutan untuk mengalah pada saudara muda akan tetapi soalnya adalah seberapa besar tingkat kemegahan itu dapat ditolerir oleh unsur-unsur dalam masyarakat Indonesia. lagi pula anggapan tentang hubungan persaudaraan seperti itu sudah tumbuh keinginan yang kuat agar hubungan kedua negara dilandasi oleh prinsip-prinsip lugas.

Bidang Militer dan Keamanan

Meredam ketegangan di Asia Pasifik menyusul selesainya perang dingin dan bepergian pasukan ASEAN dari pangkalan militer Filipina menimbulkan kekhawatiran bahwa stabilitas keamanan ini yang selama ini dianggap sangat ditentukan keseimbangan bagi empat negara raksasa yang memiliki kekuatan besar yang dapat mengganggu hubungan antara negara Asia Tenggara.

Bagi negara seperti Indonesia yang percaya kepada ketahanan nasionalnya sendiri akan memberikan peluang jika keempat kekuatan seperti AS, Rusia, Cina dan Jepang dapat bekerjasama dengan Indonesia dapat mengembangkan konsep ketahanannya yang akan bermuara pada ketahanan regional bagi Asia Tenggara dalam hal ini Indonesia menginginkan kerjasama militer seperti penjualan senjata maupun dalam latihan bersama atau memberikan pelajaran militer para perwiranya ke negara AS ataupun Rusia dan Cina namun bukan dalam hal memberikan keleluasaan dalam patroli maupun pangkalan. Lain halnya dengan Singapura maupun Filipina.

Dengan meningkatkan kekuatan militernya Malaysia yang selama ini melakukan kerjasama pembelian alat-alat militer ke AS dengan dalil hanyalah memperbaharui persenjataan yang sudah tua dan tidak memadai lagi dengan memodernisasi militer Malaysia akan mengaktifkan kembali pengaturan pertahanan lima negara (FPDA) dimana anggotanya terdiri dari Inggris, Australia, Selandia baru dimana FPDA di bentuk pada tahun 1972.

Ketika ditanya pada dialog pasifik kedua yang diselenggarakan oleh *Asia Pacific policy center* perdana menteri Mahatir Mohammad saat itu mengatakan

bahwa situasi ekonomi memerlukan pendekatan baru terhadap keamanan. Tanpa prasangka terhadap kepentingan keamanan nasional, regional, dan global. Di mana negara relatif memiliki kemampuan militer rendah harus diizinkan memperbaharui senjata mereka tanpa di tuduh mendorong perlombaan senjata Sebagai gagasan apa yang dikemukakan oleh Mahatir Mohammad itu menarik tanpa untuk mewujudkan itu soal lain. Tanpa adanya saling percaya di antara negara-negara Asia pasifik rasanya restruksi pertahanan di kawasan itu sulit dilaksanakan sebab soal membangun persenjataan bukan hanya menyangkut hubungan antara negara kecil dengan negara kecil dimana modernisasi senjata menjadi kecurigaan negara tetangganya.

C. Peluang dan Tantangan Hubungan Perdagangan Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Kerangka AFTA

Hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat terutama dari segi perdagangan yang melakukan komplementaris untuk meningkatkan pendapatan negara masing-masing dimana diketahui bahwa sejauh ini pembangunan nasional Indonesia lebih memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dalam rangka menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut yang menjadi andalan Indonesia adalah perdagangan luar negeri. melalui perdagangan luar negeri Indonesia dapat meningkatkan kerjasama antar negara. Produk-produk ekspor Indonesia sangat bersaing oleh negara-negara di dunia. Dimana kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan kerjasama bilateral melalui perdagangan dengan menghindari

pajak bagi warga negara maupun perusahaan dari kedua negara sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kerjasama kedua negara akan selalu berkembang.

Program penurunan tarif bea masuk ASEAN (AFTA) yang sejak tahun 1993 merupakan pendorong terlaksananya hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan Malaysia berusaha meningkatkan volume perdagangan tanpa menggunakan mata uang asing serta dengan penurunan tarif bea masuk bahkan kedua negara ini berupaya melakukan kerjasama tanpa pajak. Perdagangan Indonesia-Malaysia akan semakin meningkat selain penurunan tarif melalui AFTA kedua negara ini terdorong oleh peranan bank ekspor Indonesia (BEI) yang sangat ditunggu-tunggu oleh para eksportir. sejak bank tersebut didirikan pada tahun 1999, bank tersebut memberikan rencana fasilitas pembiayaan perdagangan akan di berikan dengan beberapa jenis terutama mencakup fasilitas jaminan modal, jaminan impor serta kredit jangka pendek. Dalam hal ini BEI memberikan jaminan -jaminan modal kerja untuk ekspor dan impor. Selain itu pada tahun 2006 dimana diadakannya pertemuan antara kedua negara ini dimana pertemuan ini pemerintah menyetujui di bentuknya komite ekonomi militer antara Indonesia-Malaysia menyusul aliran dana Malaysia yang semakin tinggi. Peningkatan yang disebabkan membaiknya ekspor – impor Indonesia dan Malaysia terutama bersumber pada peningkatan perdagangan non migas yang mencapai surplus US\$ 3.789.594,7 pada akhir tahun 2006, surplus juga terjadi pada ekspor non migas yang terjadi pada impor Indonesia dan Malaysia di mana total perdagangan impor Malaysia pada tahun 2006 meningkat yaitu senilai US\$ 1.604.746,9.

Dengan adanya beberapa faktor pendukung diatas prospek peningkatan perdagangan Malaysia-Indonesia semakin meningkat hal ini dapat dilihat jelas pada total perdagangan Indonesia-Malaysia yang meningkat tajam. Peningkatan kerjasama ini terlihat jelas pada total eksport Indonesia pada tahun 2006 yaitu US\$ 4.110.757,5 sedangkan peningkatan juga dialami impor Malaysia sebesar US\$ 3.193.333,6/ hal inilah yang dapat meningkatkan kerjasama kedua negara ini . selain itu Indonesia – Malaysia juga sepakat melakukan kerjasama di bidang investasi, dan energi termasuk kerjasama sub regional. Ditambah lagi pertemuan pemimpin kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama dimana kerjasama itu dapat dilakukan antara swasta dengan BUMN dari kedua negara yang terus meningkat. Pemerintah juga meningkatkan kerjasama bidang kelapa sawit.

Hubungan Indonesia-Malaysia akan semakin meningkat di tahun – tahun yang akan datang dengan seiring dengan penyelesaian konflik yang sering melanda kedua negara ini misalnya perbatasan kedua negara. Dengan adanya kebijakan pemerintah Indonesia menycpakati usulan Malaysia seperti bebas pajak berganda, maupun peningkatan investasi bagi kedua pengusaha untuk saling meningkatkan ekonomi dan keutuhan kedua negara.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab-bab terdahulu maka penulis dapat menarik kesimpulan seperti :

1. Indonesia-Malaysia merupakan dua negara yang memiliki letak geografis yang sangat berdekatan serta rumpun yang sama sebagai konsekwensi dari hidup bermasyarakat secara internasional, kedua negara menyadari akan menjalin kerjasama khususnya bidang ekonomi dan perdagangan dimana sektor perdagangan sangat berpengaruh terhadap usaha peningkatan dan mensejahterakan taraf hidup bagi kedua negara di mana perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa.
2. Banyak faktor penghambat bagi hubungan kerjasama perdagangan bagi kedua negara terutama konflik yang terjadi di Malaysia akan memberi pengaruh pada Indonesia begitu pula sebaliknya.
3. Indonesia dan Malaysia memiliki potensi yang hampir sama namun Indonesia dan Malaysia saling melengkapi atau komplementaris dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang terlihat dari kegiatan ekspor dan impor kedua belah pihak. perdagangan kedua negara dalam kerangka AFTA ini sangatlah penting di mana prospeknya cukup baik itu terbukti dari tahun 2002-2006 kedua negara mengalami surplus di bandingkan dari tahun ketahun sebelumnya yang mengalami pasang surut .

B. Saran

Dalam meningkatkan kerjasama perdagangan dalam kerangka AFTA ini sebaiknya kedua negara meningkatkan kualitas barang-barang terutama Indonesia serta untuk memperlancar pengiriman barang sebaliknya adapula peningkatan sarana dan prasarana seperti transportasi.

Pemerintah sebaiknya terbuka kepada para pengusaha dan mengurangi hambatan-hambatan dalam hal ini sistem administrasi yang terlalu bertele-tele. Dan sebaiknya kedua negara perlu terus menerus memupuk dan meningkatkan volume perdagangan serta volume kerja sama lainnya.

Bagi kedua negara kerjasama ekonomi dan perdagangan selama ini dengan fokus AFTA di manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan kemajuan ekonomi dan teknologi serta hubungan kedua negara akan terjalin di mana diketahui adanya kesamaan rumpun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakri, Umar Suryadi, 1997, *Ekonomi Politik Internasional*, LP3M Universitas Jayabaya, Jakarta.
- Bakri, Umar Suryadi, 1999, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jayabaya University Press, Jakarta.
- Chirathivat, Sathiphan, 1978, *AFTA IN The Changing International Economy*, diambil artikel Kresner, Stephen D, *Defending the National Interest*, Princeton University Press, New Jersey.
- Colombus, Theodore A, dan Wolfe, James H, 1990, *International Relations: Power and Justice*, alih bahasa M. Marbun, CV Putra A. Abardin, Bandung.
- Holski, KJ, 1988, *Politik Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Holsti, K.J, 1998, *Politik Internasional: Kerangka Untuk analisis*, terj. M. Thahir Azhari, Erlangga, Jakarta.
- Hill, John Raven, 1995, *Economic Cooperation in Southeast Asia Change Incentives*, dalam Asian Survey.
- Jones, walter S, 1993, *Logika Hubungan Internasional*, PT Gramedia pustaka, Jakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1987, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analisis*, Bina Cipta, Jakarta.
- Krisna, Didi, 1993, *Kamus Politik Internasional*, Grasindo, Jakarta.
- Kindleberger, Charles, 1988, *Ekonomi Internasional II*, Aksara Baru, Jakarta.
- Kumumoharjojo, Budiono, 1987, *Hubungan Internasional: Kerangka Study Analisis Cetak Bina Cipta*, Jakarta.
- Lane, Jan Erick, 1994, *Ekonomi Politik Komparatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mas'ood, Mochtar, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.

- Mas'oed, Mochtar, 1994, *Ekonomi Politik dan Pembangunan*, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Mason, David T, 1975, *Foregren Trades and The National Economi*, Press Publiser, New York.
- Plano, Jack C dan Olton, Roy, 1990, *Kamus Hubungan Internasional*, Abardin, Bandung.
- Plano, Jack C, dan Olton, Roy, 1990, *International Relation's Dictionary*, Alih bahasa Wawan Juanda, CV Putra A. Abardin, Bandung.
- Rudy, Teuku May, 1993, *Teori Etika dan Kebijakan Internasional*, Angkasa, Bandung.
- Rudy, T. May, 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarsono, Juwono, 1980, *Teori Pembangunan: Suatu Himbauan untuk Ekonomi Politik*, prisma, Jakarta.
- Sudarsono, Juwono, 1982, *Politik dan Pembangunan : Pikiran dan Masalah*, Jakarta
- Soeprapto, R, 1997, *Hubungan Internasional: Sistem, Interaksi dan Perilaku*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Viotti, Paul R, dan Kauppi, Mark V, 1993, *International Relations Theory (second edition)*, Macmillan Publishing Company, New York.
- Warsito, Tulus, 1998, *Teori-Teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

KORAN

- Asri Warman Adam, *Tantangan ekonomi-Politik Asia Tenggara, Tahun 1998*, Suara Pembaharuan 4 Februari 1998 (artikel).